

DRAFT



KEPUTUSAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR .../KEPMEN-KP/2021
TENTANG
RENCANA KERJA
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penyusunan rencana kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai tindak lanjut Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2021;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Rencana Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2021;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 3. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203); ^[1]_[SEP]
 5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 6. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201); ^[1]_[SEP]
 7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1521); ^[1]_[SEP]
 8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1114);
 9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan;

10. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG RENCANA KERJA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2021

- KESATU : Menetapkan Rencana Kerja (Renja) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tahun 2021 yang terdiri dari:
- a. arah kebijakan dan strategi, indikator kinerja dan target tahun 2021, serta program dan kegiatan prioritas KKP Tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
 - b. renja Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II; dan
 - c. komponen kegiatan utama tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.
- yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Renja KKP Tahun 2021 sebagaimana dimaksud diktum KESATU menjadi pedoman bagi unit kerja eselon I pada saat menjabarkan PN ke dalam Renja KKP Tahun 2021 dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) KKP Tahun 2021, yang selanjutnya dituangkan dalam Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RUU APBN 2021) dalam pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan Tahun 2021.
- KETIGA : Dalam hal terdapat penyesuaian/perbaikan Renja KKP Tahun 2021 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, penyesuaian/perbaikan tersebut harus mendapat persetujuan Menteri Kelautan dan Perikanan.
- KEEMPAT : Renja KKP Tahun 2021 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 dan Rencana Strategis KKP Tahun 2020-2024.
- KELIMA : Dalam rangka pencapaian target kinerja, pimpinan unit kerja eselon I melakukan monitoring dan evaluasi.

- KEENAM : Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud diktum KELIMA dipergunakan untuk melakukan perbaikan pelaksanaan rencana kerja.
- KETUJUH : Pimpinan unit kerja eselon I wajib menyampaikan laporan secara tertulis perkembangan pelaksanaan Renja KKP setiap 4 (empat) bulan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan.
- KEDELAPAN : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal.....Oktober 2021

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

EDHY PRABOWO

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR .../KEPMEN-KP/2021
TENTANG
RENCANA KERJA KEMENTERIAN KELAUTAN
DAN PERIKANAN TAHUN 2021

A. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kelautan dan Perikanan Tahun 2021

Sesuai dengan penjelasan pada Lampiran I Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021, RKP 2021 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang disusun sebagai penjabaran tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden No. 18/2020 tentang RPJMN 2020-2024 merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 karena menjadi RPJMN tahap akhir dan penentu pencapaian target pembangunan dalam RPJPN.

Selain itu, sesuai amanat Undang-Undang (UU) No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), penyusunan RKP merupakan upaya menjaga kesinambungan pembangunan secara terencana dan sistematis yang tanggap akan perubahan.

Pencapaian pembangunan selama kurun waktu tahun 2020-2024 akan menghadapi tantangan besar akibat adanya pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) di hampir seluruh negara di dunia, termasuk di Indonesia. Sejak awal tahun 2020 hingga triwulan kedua tahun 2020 penyebaran pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah tersebar hampir di seluruh negara di dunia dan seluruh pemerintahan daerah di Indonesia. Pandemi COVID-19 telah menimbulkan dampak pada kehidupan manusia, antara lain menyebabkan terhentinya aktivitas ekonomi di seluruh negara dan berakibat terjadinya resesi di dunia. Dampak yang dirasakan Indonesia juga cukup besar dengan terputusnya mata rantai pasokan barang dan jasa, terganggunya mobilitas masyarakat, dan terhentinya kegiatan ekonomi khususnya pada sektor industri dan pariwisata yang berdampak pada meningkatnya angka-angka pengangguran dan kemiskinan serta pada akhirnya menimbulkan kontraksi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Keadaan ini tentu harus dikendalikan, maka menjadi keharusan bagi pemerintah untuk melakukan orientasi baru dalam perencanaan pembangunan pada tahun 2021.

Dengan demikian perencanaan pembangunan pada tahun 2021 akan ditekankan pada pemulihan kehidupan masyarakat dan roda perekonomian untuk dapat kembali berjalan lancar. Disisi lain, hasil evaluasi pencapaian Prioritas

Nasional (PN) RKP tahun 2019 menunjukkan bahwa PN 4 Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air dan PN 3 Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi dan Penciptaan Lapangan Kerja melalui Pertanian, Industri, Pariwisata, dan Jasa Produktif Lainnya masih memberikan ruang untuk dilakukan peningkatan kinerjanya. Oleh karena itu, dengan memperhatikan hasil evaluasi tersebut dan kondisi Indonesia pada tahun 2021 maka tema RKP 2021, "Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial".

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 memiliki tujuh Agenda Pembangunan dengan pendekatan yang berbeda dibandingkan periode sebelumnya, yaitu memuat 41 Proyek Prioritas Strategis/*Major Project* (MP) dengan daya ungkit tinggi. Selanjutnya, untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan meningkatkan pengendalian dalam proses pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah maka tujuh PN dalam RKP 2021 ini tetap dipertahankan hingga 2024 dengan mengacu pada Agenda Pembangunan dalam RPJMN 2020-2024. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 juga telah menetapkan MP sebagai fokus dalam penyusunan dan pendanaan RKP, dengan demikian maka beberapa MP direncanakan untuk langsung dikaitkan dan difokuskan dalam rangka mendukung tema RKP 2021 ini.

Sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024 (Renstra KKP Tahun 2020-2024), Visi KKP tahun 2020-2024 adalah "Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong" yang merupakan penjabaran dari visi Presiden dan Wakil Presiden tahun 2020-2024, yaitu "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong".

Mengacu pada tugas, fungsi, dan wewenang yang telah dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan kepada KKP dan untuk melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden dalam RPJMN 2020-2024, KKP terutama melaksanakan empat dari sembilan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan uraian sebagai berikut:

1. "Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia" melalui "Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan dan Pengembangan Inovasi dan Riset Kelautan dan Perikanan";
2. "Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing" melalui "Peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional";
3. "Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan" melalui "Peningkatan Kelestarian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan"; dan
4. "Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya" melalui "Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP".

Pembangunan kelautan dan perikanan diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat, memperkuat struktur ekonomi yang kokoh dan maju serta turut serta dalam mewujudkan keanekaragaman hayati yang terjaga. Pencapaian peran tersebut dilakukan melalui program dan kegiatan yang terkait dengan prioritas pembangunan kedepan, diantaranya adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas, memperkuat pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan, meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, membangun kebudayaan dan karakter bangsa, memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim dan transformasi pelayanan publik.

Arah Kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2020-2024 mengacu kepada agenda pembangunan nasional dan arahan Presiden yang terkait dengan sektor kelautan dan dan perikanan. Arah dan kebijakan KKP yang akan ditempuh dalam tahun 2020-2024, terdiri dari:

1. memperbaiki komunikasi dengan nelayan, evaluasi kebijakan, penyederhanaan perizinan, pengembangan pelabuhan perikanan, pengaturan penangkapan ikan sampai ZEEI dan laut lepas, perlindungan dan pemberdayaan nelayan untuk peningkatan pendapatan nelayan;
2. mengoptimalkan dan memperkuat industrialisasi perikanan budidaya untuk penyerapan lapangan kerja, peningkatan pendapatan dan nilai tambah, serta penyediaan sumber protein hewan untuk konsumsi masyarakat;
3. membangkitkan industri kelautan dan perikanan melalui pemenuhan kebutuhan bahan baku industri, peningkatan kualitas mutu produk dan nilai tambah untuk peningkatan investasi dan ekspor hasil kelautan dan perikanan;
4. pengelolaan wilayah laut, pesisir dan pulau-pulau kecil, penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, dan karantina ikan melalui koordinasi dengan instansi terkait; dan
5. penguatan SDM dan inovasi riset kelautan dan perikanan.

Dalam melaksanakan lima arah kebijakan tersebut, KKP menerapkan tata kelola pemerintahan yang baik yang dilakukan oleh seluruh unit kerja di pusat dan daerah. Disamping itu, KKP melaksanakan seluruh kebijakan pengarusutamaan dalam RPJMN 2020-2024, yakni gender, pembangunan berkelanjutan, modal sosial, dan transformasi digital. Keempat mainstreaming ini akan mewarnai dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan sektor dan wilayah, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan memastikan pelaksanaannya secara inklusif. Selain mempercepat pencapaian target-target dari fokus pembangunan, pengarusutamaan ini juga bertujuan untuk memberikan akses pembangunan yang merata dan adil dengan meningkatkan efisiensi tata kelola dan juga adaptabilitas terhadap faktor eksternal lingkungan.

Kebijakan Pengarusutamaan

1) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

TPB/SDGs mencakup 17 tujuan/*goal*, 169 target, dan 241 indikator. Dalam melaksanakan TPB/SDGs, diperlukan keterkaitan antardimensi pembangunan yang saling berpengaruh. Dimensi pembangunan yang dimaksud meliputi dimensi sosial, ekonomi, dan lingkungan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat terpisahkan.

KKP akan memperkuat komitmen pelaksanaan target TPB nomor 14, yakni Ekosistem Lautan (*Life Below Water*) yang mencakup diantaranya:

- a. mengurangi pencemaran laut termasuk sampah laut;
- b. meningkatkan kapasitas/pengetahuan masyarakat kelautan dan perikanan dalam pengelolaan wilayah pesisir berbasis mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim;
- c. mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan;
- d. meminimalisasi dan mengatasi dampak pengasaman laut;
- e. mengatur kuota penangkapan per wilayah agar sumber daya ikan tetap berkelanjutan;
- f. melestarikan wilayah pesisir dan laut;
- g. mengatur subsidi perikanan agar tidak berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan ikan berlebih;
- h. meningkatkan manfaat ekonomi atas pemanfaatan berkelanjutan sumber daya laut termasuk melalui pengelolaan perikanan, budidaya air, dan pariwisata berkelanjutan;
- i. meningkatkan pengetahuan ilmiah, mengembangkan kapasitas penelitian, dan alih teknologi kelautan;
- j. menyediakan akses untuk nelayan skala kecil terhadap sumber daya laut dan pesisir; dan
- k. meningkatkan pelestarian dan pemanfaatan berkelanjutan lautan dan sumber dayanya melalui penegakan hukum internasional yang tercermin dalam *The United Nation Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS).
- l. KKP juga mendukung pencapaian target TPB nomor 2, yaitu Tanpa Kelaparan (*Zero Hunger*), dan TPB nomor 13, yaitu Penanganan Perubahan Iklim (*Climate Action*).

2) Gender

Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, dimana Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi. KKP telah melaksanakan PUG yang diarahkan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender di sektor kelautan dan perikanan dengan strategi meningkatkan peran, akses, kontrol, dan manfaat gender dalam

pembangunan kelautan dan perikanan. Strategi yang akan dilakukan adalah percepatan pelaksanaan PUG di sektor kelautan dan perikanan, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang mencakup:

- a. penguatan tujuh prasyarat Pengarusutamaan Gender (PUG), yakni: komitmen, kebijakan, kelembagaan, sumber daya, data terpilah, alat analisis, dan partisipasi masyarakat;
- b. penerapan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG);
- c. penyiapan *roadmap* PUG;
- d. pengembangan model pelaksanaan PUG terintegrasi antarunit kerja eselon I di KKP dan antara pusat dan daerah;
- e. pembuatan profil gender; dan
- f. monitoring dan evaluasi serta pengawasan PUG KKP.

KKP terus mengupayakan keadilan dan kesetaraan gender bagi masyarakat kelautan dan perikanan dengan arah kebijakan PUG. PUG diharapkan mempengaruhi sasaran strategis, seperti kebijakan pembangunan yang efisien, tata kelola sumber daya kelautan dan perikanan yang adil, serta pengendalian dan pengawasan sumber daya yang partisipatif.

Beberapa program dan kegiatan responsif gender diantaranya adalah bimbingan teknis dan bantuan pengembangan diversifikasi usaha bagi perempuan nelayan, bantuan sarana produksi peralatan pengolahan produk kelautan dan perikanan, penguatan kapasitas kelompok dalam pengelolaan usaha garam rebus, bantuan paket usaha perikanan budidaya, alih teknologi hasil riset pengolahan, dan pemanfaatan hasil perikanan.

3) Modal Sosial Budaya

Pengarusutamaan modal sosial budaya merupakan internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan. Pengetahuan tradisional (*local knowledge*), kearifan lokal (*local wisdom*), pranata sosial di masyarakat sebagai penjelmaan nilai-nilai sosial budaya komunitas harus menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan serta penyusunan kebijakan dan program pembangunan nasional. Pengarusutamaan sosial budaya ini bertujuan dan berorientasi pada penghargaan atas khazanah budaya masyarakat, sekaligus upaya pelestarian dan pemajuan kebudayaan bangsa.

Pembangunan kebudayaan ingin memastikan bahwa setiap penduduk memperoleh perlindungan hak kebudayaan dan kebebasan berekspresi untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif. Peningkatan pembangunan inklusif dan berwawasan budaya lingkup KKP, diantaranya:

- a. pelaksanaan pembangunan yang memperhatikan nilai budaya, kearifan lokal, dan keragaman SDA hayati;
- b. pengembangan dan penguatan budaya bahari dan literasi bahari; dan
- c. fasilitasi pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat di pesisir dan pulau-pulau kecil.

4) Transformasi Digital

Pengarustamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Strategi pengarusutamaan transformasi digital terdiri dari aspek pemantapan ekosistem (*supply*), pemanfaatan (*demand*), dan pengelolaan *big data*.

Penyiapan layanan digital terintegrasi lingkup KKP yang mencakup penyiapan regulasi, penguatan kelembagaan, pembangunan jaringan, sarana dan prasarana, meningkatkan kapasitas SDM dengan keahlian digital, melakukan kerja sama untuk menyediakan layanan digital dan *one data* penerapan SPBE KKP, termasuk penataan sistem perizinan berbasis web (*on-line*), serta peningkatan usaha kelautan dan perikanan melalui *e-commerce*.

B. Indikator Kinerja dan Target Tahun 2021

Sasaran Strategis yang telah ditetapkan KKP merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome/impact*) dari satu atau beberapa program. Indikator Kinerja Sasaran Strategis KKP adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis/Indikator Kinerja Sasaran Strategis Pembangunan Kelautan dan Perikanan Tahun 2021

SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA		2021
1	Indeks Kesejahteraan Masyarakat Kelautan dan Perikanan	60,31
	a. Nilai Tukar Nelayan	102,00
	b. Nilai Tukar Pembudi Daya Ikan	102,00
	c. Nilai Tukar Pengolah Hasil Perikanan	104,00
	d. Nilai Tukar Petambak Garam	103,00
2	Pertumbuhan PDB Perikanan (%)	8,11
3	Nilai ekspor hasil perikanan (USD miliar)	6,05
4	Konsumsi ikan (kg/kap/thn)	58,08
5	Proporsi tangkapan jenis ikan yang berada dalam batasan biologis yang aman pada tahun 2024 (%)	≤67%
6	Luas kawasan konservasi perairan (juta ha)	24,60
7	Persentase serapan lulusan pendidikan dan pelatihan pada Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) (%)	62
8	Hasil riset kelautan dan perikanan yang diadopsi/diterapkan (hasil riset)	8
9	WPPNRI yang menjadi model percontohan penguatan tata kelola (WPPNRI)	5
10	Penyelesaian penataan ruang laut dan zonasi pesisir (Rencana Zonasi)	24
11	Persentase Kepatuhan (<i>compliance</i>) Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (%)	95
12	Produksi perikanan (juta ton)	27,89
	a. Perikanan Tangkap	8,08
	b. Perikanan Budidaya	19,47
	- Ikan	7,92
	- Rumpul Laut	11,55
13	Produksi garam (juta ton)	3,1

SASARAN STRATEGIS DAN INDIKATOR KINERJA		2021
14	Persentase cakupan WPPNRI yang dipantau dari kegiatan <i>illegal fishing</i> (%)	60
15	Persentase Penanganan Pelanggaran bidang Kelautan dan Perikanan (%)	93
16	Nilai kinerja Reformasi Birokrasi (RB) KKP	72
17	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran/IKPA (%)	89

C. Indikator Kinerja Program

Indikator Kinerja Program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (*outcome*) dari suatu program. Indikator Kinerja Program telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program (*outcome*). Indikator kinerja program tersebut juga merupakan kerangka akuntabilitas organisasi dalam mengukur pencapaian kinerja program. Dalam kaitan ini, KKP telah menetapkan Indikator Kinerja Program dalam struktur manajemen kinerja yang merupakan sasaran kinerja program yang secara akuntabilitas berkaitan dengan beberapa unit organisasi K/L setingkat eselon I (lampiran 2). Sebagai salah satu wujud efektivitas dan efisiensi pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas bersama-sama dengan Kementerian Keuangan telah menyusun restrukturisasi program dan penganggaran K/L dengan tujuan:

1. memastikan fungsi seluruh elemen pemerintahan tercermin dan terbagi habis di seluruh program K/L;
2. memastikan pelaksanaan seluruh Prioritas Nasional dan *Major Project* terakomodasi dalam program-kegiatan-*output* K/L;
3. memastikan satu *output* dihasilkan tidak lebih dari satu K/L; dan
4. memastikan konvergensi pencapaian sasaran dalam program lintas (baik program lintas unit kerja eselon I dalam satu K/L, maupun program lintas K/L).

Pendekatan program tidak lagi mencerminkan tugas fungsi unit kerja eselon I, namun lebih mencerminkan tugas fungsi K/L. Program dapat bersifat lintas unit kerja eselon I dalam satu K/L atau bersifat lintas K/L. Perumusan program baik yang bersifat lintas unit kerja eselon I atau lintas K/L dilakukan oleh Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan dengan berkoordinasi dengan K/L terkait.

D. Indikator Kinerja Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan merupakan ukuran alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (*output*) dari suatu kegiatan. Indikator Kinerja Kegiatan telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (*output*). Indikator Kinerja Kegiatan dalam struktur manajemen kinerja di KKP merupakan sasaran kinerja kegiatan yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi K/L setingkat eselon II (lampiran 2)

C. Program, Kegiatan, Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO) Tahun 2021.

Arah kebijakan dan strategi pembangunan kelautan dan perikanan Tahun 2021, akan dilaksanakan melalui 6 (enam) program berdasarkan Redesain Sistem Perencanaan dan Penagnggaran (RSPP) sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan.

Sesuai dengan hasil Rapat Kerja Menteri Kelautan dan Perikanan tanggal 22 September 2020 tentang Penyesuaian RKA-K/L KKP Tahun 2021, Pagu Alokasi Anggaran untuk Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan sebesar **Rp.2.423,63 miliar**; yang terdiri dari Kegiatan, Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO):

- a. Kegiatan Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan dengan KRO dan RO sebagai berikut:

KRO:

- 1) ABR-Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan
- 2) ADC-Sertifikasi Produk
- 3) ADI-Sertifikasi Profesi dan SDM
- 4) BAH-Pelayanan Publik Lainnya
- 5) BDC-Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat
- 6) BDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat
- 7) BKB-Pemantauan produk
- 8) CAL-Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan
- 9) QEG-Bantuan Peralatan / Sarana
- 10)QGA-Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi
- 11)RBK-Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup

RO:

- 1) 001-Awak kapal perikanan yang disertifikasi
- 2) 001-Bantuan sarana penangkapan ikan yang diidentifikasi dan dipantau pemanfaatannya
- 3) 001-Data produktivitas kapal perikanan yang dihitung dan dianalisis
- 4) 001-Jumlah kelompok yang dibina pemanfaatan bantuan sarana penangkapan ikannya
- 5) 001-Kapal perikanan bantuan yang disalurkan
- 6) 001-Kapal perikanan yang memenuhi standar laik tangkap dan laik simpan
- 7) 001-Nelayan/awak kapal perikanan yang ditingkatkan pengetahuan/kompetensinya
- 8) 001-Prasarana SKPT Saumlaki yang dibangun
- 9) 001-Sarana penangkapan ikan yang dibangun dan dikembangkan
- 10) 001-Sarana Penangkapan Ikan yang diuji dan disertifikasi

- 11) 001-Tata kelola kelembagaan dan operasional SKPT Saumlaki yang mandiri
 - 12) 002-Alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan bantuan yang disalurkan
 - 13) 002-Kapal perikanan yang terdaftar
 - 14) 002-Pelaku usaha dan awak kapal perikanan yang difasilitasi penerapan Perjanjian Kerja Laut
 - 15) 002-Rekomendasi bahan standar dan teknis perikanan tangkap yang disusun
 - 16) 003-Persetujuan pengadaan kapal perikanan yang memenuhi ketentuan
 - 17) 003-Rekomendasi kebijakan pengelolaan alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan ikan yang disusun
 - 18) 004-Kapal perikanan kewenangan Daerah yang difasilitasi pendaftarannya
 - 19) 004-Permesinan kapal perikanan yang memenuhi aspek operasional penangkapan ikan
- b. Kegiatan Pengelolaan Pelabuhan Perikanan dengan KRO dan RO sebagai berikut:

KRO:

- 1) ADC-Sertifikasi Produk
- 2) ADI-Sertifikasi Profesi dan SDM
- 3) BAH-Pelayanan Publik Lainnya
- 4) BGA-Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi
- 5) CBQ-Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan
- 6) QGA-Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi
- 7) RBQ-Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan

RO:

- 1) 001-Layanan kepelabuhanan perikanan yang dilaksanakan
- 2) 001-Pelabuhan Perikanan UPT Pusat yang ditingkatkan fasilitasnya
- 3) 001-Pelabuhan Perikanan yang dibina tata kelola dan operasionalnya sesuai standar
- 4) 001-Pelabuhan Perikanan yang diidentifikasi rencana pembangunan/pengembangan fasilitasnya
- 5) 001-Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan (SHTI) yang diterbitkan
- 6) 001-Syahbandar di Pelabuhan Perikanan yang difasilitasi pelatihan dan penetapannya
- 7) 001-Tata kelola kelembagaan dan operasional SKPT Merauke
- 8) 002-Layanan Penerbitan Surat Rekomendasi Pendaftaran Pembangunan SPDN yang dilaksanakan
- 9) 002-Pelabuhan Perikanan daerah prioritas yang ditingkatkan fasilitasnya

- 10)002-Pelabuhan Perikanan yang dikelola dan operasional sesuai standar
- 11)003-Kajian Rencana Pembangunan Pelabuhan Perikanan yang terintegrasi dan bertaraf internasional yang disusun
- 12)003-Layanan Sertifikasi Cara Penanganan Ikan yang Baik (S-CPIB) yang dilaksanakan
- 13)003-Pelabuhan Perikanan yang ditetapkan kelasnya

c. Kegiatan Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan dengan KRO dan RO sebagai berikut:

KRO:

- 1) ACA-Perizinan Produk
- 2) BDC-Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat
- 3) BEA-Bantuan Masyarakat
- 4) FBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah
- 5) PCA-Perizinan Produk
- 6) QDC-Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat
- 7) QDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat
- 8) QEA-Bantuan Masyarakat
- 9) QEH-Bantuan Kelompok Masyarakat
- 10)QGA-Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi
- 11)UBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah

RO:

- 1) 001-Bidang tanah nelayan yang diidentifikasi untuk difasilitasi sertifikatnya
- 2) 001-Izin alokasi usaha perikanan tangkap (SIUP) yang diterbitkan
- 3) 001-Izin penangkapan/pengangkutan ikan (SIPI/SIKPI) yang diterbitkan sesuai SIUP
- 4) 001-Kampung nelayan yang ditingkatkan fasilitasnya (Kampung nelayan maju/Kalaju)
- 5) 001-Kelompok Usaha Bersama yang diidentifikasi untuk ditingkatkan kapasitas kelembagaannya
- 6) 001-Nelayan penerima Bantuan Premi Asuransi Nelayan yang diidentifikasi
- 7) 001-Nelayan yang difasilitasi perlindungannya
- 8) 001-Provinsi yang difasilitasi penerbitan izin perikanan tangkap
- 9) 001-Sistem perizinan pusat-daerah yang terintegrasi
- 10)001-Tata kelola kelembagaan dan operasional SKPT Natuna yang mandiri
- 11)002-Bantuan Premi Asuransi Nelayan yang disalurkan
- 12)002-Bidang tanah nelayan yang difasilitasi sertifikatnya

- 13)002-Kelompok Usaha Bersama yang meningkat kapasitas kelembagaannya
- 14)003-Kampung nelayan yang diidentifikasi untuk difasilitasi penataannya
- 15)003-Nelayan yang difasilitasi pengembangan usahanya
- 16)004-Kampung nelayan yang difasilitasi penataannya
- 17)004-Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan usahanya

d. Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Ikan dengan KRO dan RO sebagai berikut:

KRO:

- ABR-Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan
- BAH-Pelayanan Publik Lainnya
- BGA-Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi
- PBR-Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan
- QGA-Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi
- QKB-Pemantauan produk
- RBQ-Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan

RO:

- 1) 001-Data Log Book penangkapan Ikan yang diolah dan dianalisis
- 2) 001-Data logbook penangkapan Ikan yang dikumpulkan dan diverifikasi
- 3) 001-Data pemantauan Observer di atas kapal perikanan yang diolah dan dianalisis
- 4) 001-Kapal Perikanan Indonesia yang didaftarkan ke Regional Fisheries Management Organization (RFMO)
- 5) 001-Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang operasional
- 6) 001-Lembaga Pengelolaan Perikanan Perairan Darat (LP3D) yang operasional
- 7) 002-Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang menjadi model percontohan
- 8) 002-Prasarana Perikanan Tangkap Perairan Darat yang di tingkatkan fasilitasnya
- 9) 002-SDI Laut Pedalaman, Teritorial dan Perairan Kepulauan yang terkelola dan termanfaatkan
- 10)002-Sumber Daya Ikan (SDI) Perairan Darat yang terkelola dan termanfaatkan
- 11)003-Prasarana Pemulihan Sumber Daya Ikan Berkelanjutan yang dibangun

12)003-SDI Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) dan laut lepas yang terkelola dan termanfaatkan

13)003-Tata kelola kelembagaan dan operasional SKPT Sebatik yang mandiri

14)004-Alokasi SDI yang dihitung dan dievaluasi

e. Kegiatan Pengelolaan Perbenihan Ikan dengan KRO dan RO sebagai berikut:

KRO:

- BAB-Pelayanan Publik kepada Lembaga
- BAH-Pelayanan Publik Lainnya
- CAL-Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan
- PBR-Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan
- PFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria
- QDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat
- QEG-Bantuan Peralatan / Sarana
- QEL-Bantuan Hewan
- RAL-Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan
- RBQ-Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan
- RDQ-OM Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan

RO:

- 1) 001-Benih Ikan Air Tawar yang disalurkan ke masyarakat
- 2) 001-Calon Induk Unggul Ikan Air Tawar yang diproduksi
- 3) 001-Data dan Informasi Bidang Perbenihan yang diolah dan dianalisis
- 4) 001-Kelompok Masyarakat di SKPT Rote Ndao yang difasilitasi dan dibina
- 5) 001-Layanan Diseminasi Teknologi PB Bidang Perbenihan
- 6) 001-NSPK Bidang Perbenihan Ikan yang disusun
- 7) 001-OM Prasarana SKPT Rote Ndao yang sudah dibangun
- 8) 001-Sarana perbenihan ikan yang disalurkan ke masyarakat
- 9) 001-Sarana teknologi yg diproduksi oleh UPT bidang perbenihan
- 10)001-Sertifikasi Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) yang diterbitkan
- 11)002-Benih Ikan Air Payau yang disalurkan ke masyarakat
- 12)002-Calon Induk Unggul Ikan Air Payau yang diproduksi
- 13)002-Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana UPR/HSRT
- 14)002-Pusat Produksi Benih dan Induk yang dikembangkan
- 15)003-Benih Ikan Laut yang disalurkan ke masyarakat
- 16)003-Bibit Rumput Laut yang didistribusikan ke masyarakat (SBK)
- 17)003-Calon Induk Unggul Ikan Laut yang diproduksi
- 18)051-Calon Induk Unggul yg disalurkan ke masyarakat

- f. Kegiatan Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan dengan KRO dan RO sebagai berikut:

KRO:

- BAH-Pelayanan Publik Lainnya
- BJC-Penyidikan dan Pengujian Penyakit
- CAL-Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan
- PBR-Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan
- PFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria
- QEG-Bantuan Peralatan / Sarana
- QJC-Penyidikan dan Pengujian Penyakit
- RAL-Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan
- RBQ-Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan

RO:

- 1) 001-Data dan Informasi Bidang Kawasan dan Kesehatan Ikan yang diolah dan dianalisis
- 2) 001-Kluster kawasan tambak Udang dan Bandeng yang dikembangkan
- 3) 001-Layanan Diseminasi Teknologi PB Bidang Kawasan dan Kesehatan Ikan
- 4) 001-NSPK Kawasan dan Kesehatan Ikan yang disusun
- 5) 001-Peralatan Laboratorium pengujian penyakit dan lingkungan yang disediakan
- 6) 001-Sampel Monitoring Residu yang diuji
- 7) 001-Sampel Residu (SBK)
- 8) 001-Sarana Kawasan Perikanan Budidaya yang disalurkan ke masyarakat
- 9) 002-Irigasi perikanan yang dikelola secara partisipatif (PITAP)
- 10)002-Sampel Kualitas Air (SBK)
- 11)002-Sampel Surveillance Penyakit Ikan yang diuji
- 12)002-Sarana teknologi yg diproduksi oleh UPT bidang kawasan dan kesehatan ikan
- 13)003-Kluster Kawasan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya yang dikembangkan
- 14)003-Sampel Patologi (SBK)
- 15)004-Prasarana produksi di Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang direhabilitasi dan ditingkatkan
- 16)004-Sampel Mikrobiologi (SBK)
- 17)005-Sampel Biologi Molekuler (SBK)
- 18)006-Sampel Pengujian Kawasan dan Kesehatan Ikan

- g. Kegiatan Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan dengan KRO dan RO sebagai berikut:

KRO:

- ACD-Perizinan Lembaga
- BAB-Pelayanan Publik kepada Lembaga
- BAH-Pelayanan Publik Lainnya
- CAL-Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan
- PBR-Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan
- PFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria
- QDC-Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat
- QDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat
- QEA-Bantuan Masyarakat
- QEG-Bantuan Peralatan / Sarana
- RBQ-Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan

RO:

- 1) 001-Bantuan Premi Asuransi Usaha Pembudidaya Ikan Skala Kecil yang disalurkan
- 2) 001-Data dan Informasi Produksi dan Usaha yang diolah dan dianalisis
- 3) 001-Kelompok Masyarakat di SKPT Sumba Timur yang difasilitasi dan dibina
- 4) 001-Layanan Diseminasi Teknologi PB Bidang Produksi dan Usaha
- 5) 001-NSPK Produksi dan Usaha yang disusun
- 6) 001-Perizinan Usaha Perikanan Budidaya yang diterbitkan
- 7) 001-Prasarana Produksi dan Usaha yang dikembangkan
- 8) 001-Rekomendasi Bidang Lahan pembudidaya ikan yang akan disertifikasi
- 9) 001-Sarana produksi usaha perikanan budidaya yang didistribusikan ke masyarakat
- 10)001-Sarana teknologi yg diproduksi oleh UPT bidang produksi dan usaha pembesaran ikan
- 11)001-Sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) yang diterbitkan
- 12)002-Sarana budidaya sistem minapadi yang didistribusikan ke masyarakat

- h. Kegiatan Pengelolaan Pakan dan Obat Ikan dengan KRO dan RO sebagai berikut:

KRO:

- ACA-Perizinan Produk
- BAH-Pelayanan Publik Lainnya
- BJC-Penyidikan dan Pengujian Penyakit
- CAL-Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan

- PBR-Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan
- PFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria
- QEG-Bantuan Peralatan / Sarana
- RAL-Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan
- RBQ-Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan
- RDQ-OM Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan

RO:

- 1) 001-Data dan Informasi Pakan dan Obat Ikan yang diolah dan dianalisis
- 2) 001-Layanan Diseminasi Teknologi PB Bidang Pakan dan Obat Ikan
- 3) 001-NSPK Pakan dan Obat Ikan yang disusun
- 4) 001-OM Prasarana SKPT Sabang yang sudah dibangun
- 5) 001-Pakan dan Obat Ikan diregistrasi
- 6) 001-Pakan Ikan yang diproduksi untuk operasional Unit Pelaksana Teknis (UPT)
- 7) 001-Peralatan/sarana pakan dan obat ikan yang disalurkan ke masyarakat
- 8) 001-Prasarana pakan dan obat ikan yang dikembangkan
- 9) 001-Sampel Nutrisi Pakan (SBK)
- 10)001-Sarana teknologi yg diproduksi oleh UPT untuk produksi pakan dan obat ikan
- 11)002-Pakan Ikan yang disalurkan ke masyarakat
- 12)002-Sampel Obat Ikan (SBK)

- i. Kegiatan Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan dengan KRO dan RO sebagai berikut:

KRO:

- AFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria
- BAH-Pelayanan Publik Lainnya
- BID-Pengawasan dan Pengendalian Kelompok Masyarakat
- BKB-Pemantauan produk
- CAL-Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan
- CBQ-Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan
- QDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat
- QHD-Operasi Pengawasan Sumber Daya Alam
- RAL-Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan
- RBQ-Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan
- RCG-OM Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup

RO:

- 1) 001-Armada Pengawasan SDKP yang Dirawat

- 2) 001-Kapal Pengawas
 - 3) 001-Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang dibina dalam membantu pengawasan SDKP
 - 4) 001-Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang dievaluasi keaktifannya
 - 5) 001-Layanan penerbitan Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT)
 - 6) 001-NSPK Pemantauan dan Operasi Armada
 - 7) 001-Operasi Kapal Pengawas
 - 8) 001-Prasarana pengawasan SDKP pendukung yang dibangun
 - 9) 001-Prasarana Pengawasan SDKP yang dibangun
 - 10)001-Sarana Pengawasan SDKP Lainnya
 - 11)002-Operasi Pesawat Patroli
 - 12)002-Sistem Pemantauan SDKP yang Operasional dan Terintegrasi
 - 13)002-Speedboat Pengawas
 - 14)003-Operasional Speed Boat 6,5 Meter (SBK)
 - 15)003-Sistem Pemantauan
 - 16)004-Operasional Speed Boat 8 Meter (SBK)
 - 17)005-Operasional Speed Boat 12 Meter (Bensin) (SBK)
 - 18)006-Operasional Speed Boat 12 Meter (Solar) (SBK)
 - 19)007-Operasional Speed Boat 16 Meter (SBK)
 - 20)008-Operasional Rigid Inflatable Boat (SBK)
 - 21)009-Operasional Rubber Boat (SBK)
 - 22)011-Operasi Armada Pengawasan SDKP yang disupervisi
 - 23)012-Prasarana Pengawasan SDKP yang disupervisi Pembangunannya
 - 24)013-Sarana Pengawasan PSDKP yang disupervisi pembangunannya
- j. Kegiatan Penanganan Pelanggaran Bidang Kelautan dan Perikanan dengan KRO dan RO sebagai berikut:
- KRO:**
- AEA-Koordinasi
 - AFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria
 - BCE-Penanganan Perkara
 - BDC-Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat
 - BKB-Pemantauan produk
- RO:**
- 1) 001-Koordinasi Satgas Pemberantasan Illegal Fishing
 - 2) 001-Nelayan yang difasilitasi pemulangannya
 - 3) 001-NSPK Penanganan Pelanggaran
 - 4) 001-Pemberkasan Perkara TPKP Mudah (SBK)

- 5) 001-Supervisi, Monev dan Bimtek di Bidang Penanganan Perkara TPKP
 - 6) 002-Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan Tingkat Pusat
 - 7) 002-Nelayan yang diberikan pemahaman untuk tidak melintas batas ke perairan negara lain
 - 8) 002-Pemberkasan Perkara TPKP Sedang (SBK)
 - 9) 003-Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan Tingkat Daerah
 - 10)004-Kerja Sama Teknis Penanganan TPKP Yang Terjadi Lintas Negara
 - 11)005-Ekspose/Gelar Perkara TPKP
 - 12)006-Penanganan Barang Bukti TPKP (SBK)
 - 13)007-Penanganan Awak Kapal TPKP (SBK)
- k. Kegiatan Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dengan KRO dan RO sebagai berikut:

KRO:

- AEA-Koordinasi
- AFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria
- BDC-Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat
- BIC-Pengawasan dan Pengendalian Lembaga
- BKB-Pemantauan produk
- QIC-Pengawasan dan Pengendalian Lembaga

RO:

- 1) 001-Koordinasi, sinkronisasi dan sinergi antar K/L/SKPD, pusat-daerah, pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Pengawasan Sumber Daya Kelautan
- 2) 001-Masyarakat yang memperoleh penyadartahuan dalam pemanfaatan sumber daya kelautan
- 3) 001-NSPK Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan
- 4) 001-Supervisi, Monev, dan Bimtek Pemeriksaan Kepatuhan Unit Usaha Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan Nasional
- 5) 001-Unit usaha pemanfaatan jenis ikan dilindungi dan/atau Apendiks Cites yang diperiksa kepatuhannya
- 6) 001-Unit usaha pemanfaatan kawasan konservasi perairan nasional yang diperiksa kepatuhannya
- 7) 002-Supervisi, Monev, dan Bimtek Pemeriksaan Kepatuhan Unit Usaha Pemanfaatan Jenis Ikan Dilindungi dan/atau Apendiks Cites
- 8) 002-Unit usaha pengelolaan produk dan jasa kelautan yang diperiksa kepatuhannya
- 9) 002-Unit Usaha Perikanan yang diawasi dari Kegiatan Penangkapan Ikan yang Merusak

- 10)003-Supervisi, Monev, dan Bimtek Pemeriksaan Kepatuhan Unit Usaha Pengelolaan Produk dan Jasa Kelautan
- 11)003-Unit usaha pengelolaan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil dan ruang laut yang diperiksa kepatuhannya
- 12)004-Supervisi, Monev, dan Bimtek Pemeriksaan Kepatuhan Unit Usaha Pengelolaan Wilayah Pesisir, Pulau-pulau Kecil dan Ruang Laut
- 13)004-Unit usaha perikanan dan non perikanan yang diperiksa kepatuhannya dalam pengelolaan limbah yang berdampak pada sumber daya ikan dan lingkungannya
- 14)005-Supervisi, Monev, dan Bimtek Pemeriksaan Kepatuhan Unit Usaha Perikanan dan Non Perikanan Dalam Pengelolaan Limbah yang Berdampak pada Sumber Daya Ikan dan Lingkungannya
- 15)006-Supervisi, Monev, dan Bimtek Pemeriksaan Kepatuhan Unit Usaha Perikanan Terhadap Pelarangan Kegiatan Penangkapan Ikan yang Merusak

I. Kegiatan Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan dengan KRO dan RO sebagai berikut:

KRO:

- AEA-Koordinasi
- AFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria
- BDC-Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat
- BIC-Pengawasan dan Pengendalian Lembaga
- BKB-Pemantauan produk
- QIC-Pengawasan dan Pengendalian Lembaga

RO:

- 1) 001-Kapal perikanan yang diperiksa kepatuhannya
- 2) 001-Koordinasi, sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan Pengawasan Sumber Daya Perikanan
- 3) 001-Masyarakat yang memperoleh penyadartahuan dalam pemanfaatan sumber daya perikanan
- 4) 001-NSPK bidang Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan
- 5) 001-Supervisi, evaluasi dan bimtek pengawasan kepatuhan kapal perikanan
- 6) 001-Unit usaha pengolahan hasil perikanan yang diperiksa kepatuhannya
- 7) 002-Supervisi, evaluasi dan bimtek pengawasan kepatuhan unit usaha pengolahan hasil perikanan
- 8) 002-Unit usaha yang melakukan distribusi hasil perikanan yang diperiksa kepatuhannya

- 9) 003-Supervisi, evaluasi dan bimtek pengawasan kepatuhan unit usaha pembudidayaan ikan
 - 10)003-Unit usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya
 - 11)004-Supervisi, evaluasi dan bimtek pengawasan kepatuhan unit usaha yang melakukan distribusi hasil perikanan
- m. Kegiatan Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan dengan KRO dan RO sebagai berikut:

KRO:

- ABR-Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan
- AFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria
- BAH-Pelayanan Publik Lainnya
- BDC-Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat
- BDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat
- BDF-Fasilitasi dan Pembinaan Koperasi
- BDH-Fasilitasi dan Pembinaan Badan Usaha
- CDQ-OM Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan
- PBR-Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan
- QDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga
- QEG-Bantuan Peralatan / Sarana
- RBQ-Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan

RO:

- 1) 001-Badan Usaha perikanan yang dibina dalam rangka pengadaan dan penyimpanan hasil perikanan
- 2) 001-Gudang Beku
- 3) 001-Gudang Beku Portable
- 4) 001-Kelompok masyarakat perikanan yang dibina dalam rangka pengadaan dan penyimpanan hasil perikanan
- 5) 001-Koperasi perikanan yang dibina dalam rangka pengadaan dan penyimpanan hasil perikanan
- 6) 001-Layanan Pemasukan Hasil Perikanan
- 7) 001-Lembaga Pengelola SKPT Mimika yang dibina dan dioperasikan
- 8) 001-Masyarakat yang dibina dalam rangka pengadaan dan penyimpanan hasil perikanan
- 9) 001-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria Bidang Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan
- 10)001-Operasional dan Maintenance Kapal Logistik Ikan
- 11)001-Rekomendasi Kebijakan Ketersediaan, Kebutuhan, dan Harga Ikan yang Disusun
- 12)001-Rekomendasi sistem telusur dan logistik Ikan Nasional

- 13)002-Badan Usaha perikanan dan penyedia layanan jasa logistik yang dibina dalam rangka distribusi dan transportasi hasil perikanan
 - 14)002-Koperasi perikanan yang dibina dalam rangka distribusi dan transportasi hasil perikanan
 - 15)002-Mobil refrigasi (berpendingin)
 - 16)002-Pabrik Es
 - 17)002-Rekomendasi kebijakan Penataan rantai pasok hasil perikanan dalam koridor logistik yang disusun
 - 18)003-Mobil nonrefrigasi (tidak berpendingin)
 - 19)003-Rekomendasi kebijakan rantai pasok hasil perikanan dalam koridor logistik yang disusun daerah
- n. Kegiatan Investasi dan Keberlanjutan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan dengan KRO dan RO sebagai berikut:

KRO:

- ACD-Perizinan Lembaga
- AEH-Promosi
- AFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria
- PBR-Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan
- QDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga
- QDG-Fasilitasi dan Pembinaan UMKM

RO:

- 1) 001-Lembaga usaha KP yang ditingkatkan kapasitasnya
 - 2) 001-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria Bidang Investasi dan Keberlanjutan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan
 - 3) 001-Perizinan usaha pengolahan bagi Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan
 - 4) 001-Promosi Usaha dan Investasi KP
 - 5) 001-Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Klaster Daya Saing KP
 - 6) 001-UMKM KP yang difasilitasi kemitraan usaha dan investasi
 - 7) 002-Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Biak Numfor yang mandiri
 - 8) 002-Wirausaha KP yang ditumbuhkan dan/atau dibina
 - 9) 003-UMKM KP yang difasilitasi akses pembiayaan kredit program
- o. Kegiatan Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan dengan KRO dan RO sebagai berikut:

KRO:

- ABR-Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan
- AFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria
- BAH-Pelayanan Publik Lainnya
- PBR-Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan
- PFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria
- QAH-Pelayanan Publik Lainnya

- QDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat
- QEG-Bantuan Peralatan / Sarana
- RAI-Sarana Pengembangan Kawasan
- RBK-Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup
- RDQ-OM Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan

RO:

- 1) 001-Dokumen NSPK Jasa Kelautan
 - 2) 001-Kelompok Masyarakat di SKPT Kepulauan Talaud yang diberikan fasilitasi dan pembinaan
 - 3) 001-Lahan Garam yang difasilitasi
 - 4) 001-Layanan Perizinan Pengelolaan Perairan
 - 5) 001-Layanan Perizinan Reklamasi
 - 6) 001-OM Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan dan Perikanan di SKPT Kepulauan Talaud
 - 7) 001-Prasarana di SKPT Kepulauan Talaud
 - 8) 001-Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Reklamasi
 - 9) 001-Rekomendasi Kebijakan/Perizinan Pemanfaatan pesisir dan laut untuk bangunan dan instalasi di laut
 - 10)001-Sarana prasarana Wisata Bahari
 - 11)002-Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Perairan
 - 12)002-Rekomendasi Pemetaan Potensi Biofarmakologi dan Pemanfaatan Air Laut
 - 13)002-Sarana prasarana BMKT
 - 14)003-Sarana niaga Garam Rakyat yang dibangun
 - 15)004-Gerai Biofarmakologi yang dibangun
 - 16)005-Sarana yang didistribusikan ke SKPT Kepulauan Talaud
 - 17)051-Dokumen NSPK Jasa Kelautan
- p. Kegiatan Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan KRO dan RO sebagai berikut:

KRO:

- ABR-Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan
- AFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria
- BAH-Pelayanan Publik Lainnya
- QDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat
- QEG-Bantuan Peralatan / Sarana
- RBQ-Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan
- RDQ-OM Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan

RO:

- 1) 001-Bantuan Ekonomi Produktif Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar

- 2) 001-Dokumen NSPK Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- 3) 001-Izin pulau-pulau kecil/terluar yang dimanfaatkan
- 4) 001-Masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang diakui dan dikuatkan kelembagaannya
- 5) 001-OM Prasarana SKPT Pulau Morotai
- 6) 001-Prasarana/Infrastruktur di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar
- 7) 001-Rekomendasi Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil/Terluar
- 8) 002-Kelompok Masyarakat di SKPT Pulau Morotai yang diberikan fasilitasi dan pembinaan
- 9) 002-Prasarana di SKPT Pulau Morotai
- 10)002-Pulau-Pulau Keci/Terluar yang difasilitasi sertifikasinya
- 11)002-Sarana yang didistribusikan ke SKPT Pulau Morotai

q. Kegiatan Perencanaan Ruang Laut dengan KRO dan RO sebagai berikut:

KRO:

- PBR-Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan
- PBT-Kebijakan Bidang Ruang dan Pertanahan
- PFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria
- QAH-Pelayanan Publik Lainnya
- QDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat
- QEG-Bantuan Peralatan / Sarana
- RBQ-Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan
- RDQ-OM Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan
- UBA-Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah

RO

- 1) 001-Dokumen NSPK Perencanaan Ruang Laut
- 2) 001-Kelompok Masyarakat di SKPT Maluku Barat Daya yang diberikan fasilitasi dan pembinaan
- 3) 001-OM Prasarana SKPT Maluku Barat Daya
- 4) 001-Pelayanan perizinan berusaha pemanfaatan di laut
- 5) 001-Penyelenggaraan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- 6) 001-Perairan laut antar wilayah yang memiliki dokumen Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah
- 7) 001-Prasarana di SKPT Maluku Barat Daya
- 8) 001-Rekomendasi Perizinan Lokasi Perairan dan Laut
- 9) 001-Sarana yang didistribusikan ke SKPT Maluku Barat Daya
- 10)002-Perairan KSN yang memiliki Dokumen Rencana Zonasi KSN
- 11)002-Provinsi yang difasilitasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut
- 12)002-Rekomendasi Perizinan Pemanfaatan Ruang Laut untuk PSN
- 13)003-Perairan KSNT yang memiliki Dokumen Rencana Zonasi KSNT

- 14)003-Rekomendasi Penyusunan Rencana Aksi Pengelolaan Ruang Laut Kawasan Antar Wilayah
- 15)004-Profil Sumberdaya Kawasan Laut
- 16)004-Rekomendasi Penyusunan Rencana Aksi Pengelolaan Ruang Laut Kawasan Strategis Nasional
- 17)005-Data Atribut dan Spasial Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut
- 18)005-Rekomendasi Penyusunan Rencana Aksi Pengelolaan Ruang Laut Kawasan Strategis Nasional Tertentu
- 19)006-Rekomendasi Penyusunan Rencana Aksi Pengelolaan Ruang Laut Nasional

r. Kegiatan Karantina Ikan dengan KRO dan RO sebagai berikut:

KRO:

- ABR-Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan
- BIA-Pengawasan dan Pengendalian Produk
- PDF-Sertifikasi Lembaga
- QAH-Pelayanan Publik Lainnya
- QIA-Pengawasan dan Pengendalian Produk
- RAL-Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan
- RBQ-Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan

RO:

- 1) 001-Dokumen mitigasi resiko lalulintas hasil perikanan
- 2) 001-Layanan Sertifikasi karantina ekspor, impor dan domestik
- 3) 001-Peta Lokasi Sebaran Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK)
- 4) 001-Prasarana pengawasan karantina
- 5) 001-Sarana pengawasan karantina
- 6) 001-Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity
- 7) 002-Kasus pelanggaran perkarantinaan ikan yang di selesaikan
- 8) 002-Peta Lokasi Sebaran Jenis Ikan yang Dilarang, Bersifat Invasif
- 9) 003-Dokumen Harmonisasi Sistem Perkarantinaan dan Keamanan Hayati Ikan dalam dan luar Negeri

s. Kegiatan Standardisasi Sistem dan Kepatuhan dengan KRO dan RO sebagai berikut:

KRO:

- ABR-Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan
- ADD-Standarisasi Lembaga
- AFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria
- BIC-Pengawasan dan Pengendalian Lembaga
- PBR-Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan
- PDD-Standarisasi Lembaga

RO:

- 1) 001-NSPK standarisasi sistem dan kepatuhan Perkarantinaan ikan dan mutu hasil perikanan
- 2) 001-Parameter uji yang terakreditasi di laboratorium acuan dan penguji sektor kelautan perikanan
- 3) 001-Unit kerja dan Pelaku Usaha KIPM yang di Periksa tingkat Kepatuhan berdasarkan Peraturan Pemasukan dan Pengeluaran
- 4) 001-Unit Kerja yang menerapkan standar pelayanan publik
- 5) 001-Unit kerja yang menerapkan standar sistem
- 6) 002-Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen
- 7) 003-Unit kerja yang menerapkan pengendalian sistem jaminan perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan
- 8) 004-Unit kerja wilayah perbatasan yang telah menerapkan standar pelayanan mutu dan karantina
- 9) 009-Standar/metode uji yang dihasilkan laboratorium acuan

2. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri

Sesuai dengan hasil Rapat Kerja Menteri Kelautan dan Perikanan tanggal 22 September 2020 tentang Penyesuaian RKA-K/L KKP Tahun 2021, Pagu Alokasi Anggaran untuk Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri sebesar **Rp.244,12 miliar**; yang terdiri dari Kegiatan, Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO):

- a. Kegiatan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan dengan KRO dan RO sebagai berikut:

KRO:

- ABR-Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan
- AFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria
- BDB-Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga
- PBR-Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan
- PEH-Promosi
- QEG-Bantuan Peralatan / Sarana
- RBQ-Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan

RO:

- 1) 001-Kajian Rencana Pembangunan Pasar Ikan Bertaraf Internasional
- 2) 001-Kampanye Gerakan Masyarakat Makan Ikan (Gemarikan)
- 3) 001-Lembaga Pengelola Pasar Ikan yang dibina
- 4) 001-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria Bidang Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan
- 5) 001-Pasar Ikan
- 6) 001-Perlengkapan Pedagang Ikan
- 7) 001-Rekomendasi Kebijakan pemetaan preferensi, konsumsi dan kebutuhan ikan konsumen dalam negeri

- 8) 002-Kampanye Gemarikan yang dilaksanakan oleh daerah
 - 9) 002-Peralatan Pemasaran
 - 10)002-Rekomendasi Kebijakan strategi akses pasar negara tujuan ekspor
 - 11)002-Sentra Kuliner Ikan
 - 12)003-Pasar Kuliner dan Sentra Promosi Produk Perikanan
 - 13)003-Promosi Produk Kelautan dan Perikanan Skala Internasional
- b. Kegiatan Pengolahan dan Bina Mutu Produk Kelautan dan Perikanan dengan KRO dan RO sebagai berikut:

KRO:

- ABR-Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan
- AFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria
- BDG-Fasilitasi dan Pembinaan UMKM
- BDI-Fasilitasi dan Pembinaan Industri
- PBR-Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan
- PDC-Sertifikasi Produk
- QEG-Bantuan Peralatan / Sarana
- RBQ-Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan

RO:

- 1) 001-Chest freezer penyimpanan ikan
 - 2) 001-NSPK Bidang Pengolahan dan Bina Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan
 - 3) 001-Rekomendasi Penerbitan Sertifikat Kelayakan (SKP) oleh daerah (Dekonsentrasi)
 - 4) 001-Rekomendasi Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) produk hasil KP
 - 5) 001-Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang diterbitkan bagi Unit Pengolahan Ikan
 - 6) 001-Unit Penanganan dan Unit Pengolahan Produk Hasil KP Skala Menengah Besar yang dibina
 - 7) 001-Unit Penanganan dan Unit Pengolahan Produk Hasil KP Skala Mikro Kecil yang dibina dalam rangka pembinaan mutu
 - 8) 001-Unit Pengolahan Ikan (UPI) bernilai tambah yang dibangun menuju Zero Waste
 - 9) 002-Peralatan pengolahan ikan
 - 10)002-Rekomendasi Peta Kebutuhan Bahan Baku dan Hasil Penghitungan Utilitas UPI
 - 11)002-Unit Pengolahan Produk Hasil KP Skala Mikro Kecil yang dibina dalam rangka diversifikasi produk
 - 12)003-Sarana Pasca Panen
- c. Kegiatan Pengendalian Mutu dengan KRO dan RO sebagai berikut:

KRO:

- ABR-Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan
- ADF-Sertifikasi Lembaga
- AFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria
- BIA-Pengawasan dan Pengendalian Produk
- QAH-Pelayanan Publik Lainnya
- QIA-Pengawasan dan Pengendalian Produk
- QIC-Pengawasan dan Pengendalian Lembaga
- RAL-Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan
- RBQ-Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan

RO:

- 1) 001- Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability
 - 2) 001-Dokumen pengawasan dan penyelesaian kasus mutu ekspor impor produk perikanan
 - 3) 001-Hasil Perikanan di wilayah RI yang diawasi mutunya
 - 4) 001-Layanan Sertifikasi dan pengawasan mutu hasil perikanan
 - 5) 001-NSPK Sistem Pengendalian mutu dan keamanan hasil perikanan
 - 6) 001-Prasarana Pengujian Mutu
 - 7) 001-Sarana Pengujian Mutu
 - 8) 001-Sertifikasi CPIB pada suplier hasil perikanan
 - 9) 009-Dokumen Harmonisasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan
- d. Kegiatan Pengujian Penerapan Hasil Kelautan dan Perikanan dengan KRO dan RO sebagai berikut:

KRO:

- ABR-Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan
- AEF-Sosialisasi dan Diseminasi
- BAH-Pelayanan Publik Lainnya
- BDG-Fasilitasi dan Pembinaan UMKM
- BJA-Penyidikan dan Pengujian Produk
- DDA-Penelitian dan Pengembangan Produk

RO:

- 1) 001-Data Hasil Pengujian Produk Kelautan dan Perikanan
- 2) 001-Diseminasi Hasil Pengujian Penerapan Kelautan dan Perikanan
- 3) 001-Layanan Penilaian Kesesuaian Produk Kelautan dan Perikanan
- 4) 001-Produk Rekayasa Inovasi Teknologi Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan
- 5) 001-Rekomendasi Bahan RSNi Produk Kelautan dan Perikanan
- 6) 001-UMKM yang Dibina dalam Inkubator Bisnis

3. Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

Sesuai dengan hasil Rapat Kerja Menteri Kelautan dan Perikanan tanggal 22 September 2020 tentang Penyesuaian RKA-K/L KKP Tahun 2021, Pagu Alokasi Anggaran untuk Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi sebesar **Rp. 365,43 miliar**; yang terdiri dari Kegiatan, Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO):

- a. Kegiatan Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan dengan KRO dan RO sebagai berikut:

KRO:

- AFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria
- DCC-Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan
- DDA-Penelitian dan Pengembangan Produk
- QDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat
- RAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup
- RAL-Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan
- RBK-Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup
- RBQ-Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan
- SCC-Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan

RO:

- 1) 001- Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih
 - 2) 001-Inovasi yang diterapkan sebagai percontohan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan
 - 3) 001-Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh KP
 - 4) 001-Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Bersertifikat Kompetensi
 - 5) 001-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria Pelatihan dan Penyuluhan KP
 - 6) 001-Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan
 - 7) 001-Sarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan
 - 8) 002-Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang bersertifikat
- b. Kegiatan Pendidikan Kelautan dan Perikanan dengan KRO dan RO sebagai berikut:

KRO:

- AFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria
- QDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat
- RAA-Sarana Bidang Pendidikan
- RBI-Prasarana Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah
- RBJ-Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi
- SAC-Pendidikan Vokasi Bidang Pertanian dan Perikanan
- SDA-Penelitian dan Pengembangan Produk

RO:

- 1) 001-Kajian Pendidikan Tinggi KP
- 2) 001-Kelompok Masyarakat Yang Mendapatkan Penerapan Ilmu Pengetahuan Atau Teknologi Pendidikan Tinggi
- 3) 001-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria Pendidikan Kelautan dan Perikanan
- 4) 001-Peserta Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan Yang Kompeten
- 5) 001-Prasarana Pendidikan Menengah KP
- 6) 001-Prasarana Pendidikan Tinggi KP
- 7) 001-Sarana Pendidikan KP

4. Program Kualitas Lingkungan

Sesuai dengan hasil Rapat Kerja Menteri Kelautan dan Perikanan tanggal 22 September 2020 tentang Penyesuaian RKA-K/L KKP Tahun 2021, Pagu Alokasi Anggaran untuk Program Kualitas Lingkungan sebesar **Rp. 365,43 miliar**; yang terdiri dari Kegiatan, Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO):

- a. Kegiatan Perlindungan dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut dengan KRO dan RO sebagai berikut:

KRO:

- PBR-Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan
- PEC-Kerja sama
- PEE-Kemitraan
- PFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria
- QAH-Pelayanan Publik Lainnya
- QDD-Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat
- QEG-Bantuan Peralatan / Sarana
- QEH-Bantuan Kelompok Masyarakat
- RBQ-Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan
- RDQ-OM Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan
- REA-Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem
- REB-Konservasi Jenis/Spesies

RO:

- 1) 001-Dokumen NSPK Konservasi dan keanekaragaman Hayati Laut
- 2) 001-Izin Kegiatan Pemanfaatan di Kawasan Konservasi
- 3) 001-Jejaring dan Kemitraan Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut
- 4) 001-Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang Baru Ditetapkan
- 5) 001-Keanekaragaman Hayati Perairan Terancam Punah yang Dilindungi dan/atau Dilestarikan

- 6) 001-Kelompok Masyarakat di SKPT Kepulauan Mentawai yang diberikan fasilitasi dan pembinaan
 - 7) 001-Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi
 - 8) 001-Kerjasama Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut
 - 9) 001-OM Prasarana SKPT Kepulauan Mentawai
 - 10)001-Prasarana di SKPT Kepulauan Mentawai
 - 11)001-Rekomendasi Konvensi Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut
 - 12)001-Sarana yang didistribusikan ke SKPT Kepulauan Mentawai
 - 13)002-Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang Operasional
 - 14)002-Keanekaragaman Hayati Perairan yang dikelola pemanfaatannya secara Berkelanjutan
 - 15)003-Kawasan Konservasi yang dimanfaatkan Secara Berkelanjutan
- b. Kegiatan Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan KRO dan RO sebagai berikut:

KRO:

- Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria
- QEG-Bantuan Peralatan / Sarana
- RBH-Prasarana Bidang Pengendalian Bencana
- RBQ-Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan
- REA-Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem

RO:

- 1) 001-Dokumen NSPK Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
 - 2) 001-Kawasan mangrove yang direhabilitasi
 - 3) 001-Prasarana Kawasan Pesisir Tangguh
 - 4) 001-Prasarana Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
 - 5) 001-Sarana Penanggulangan Pencemaran Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
 - 6) 002-Prasarana Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim
 - 7) 002-Prasarana Penanggulangan Pencemaran Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
 - 8) 002-Vegetasi pantai yang ditanami untuk mitigasi bencana
4. Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
- Sesuai dengan hasil Rapat Kerja Menteri Kelautan dan Perikanan tanggal 22 September 2020 tentang Penyesuaian RKA-K/L KKP Tahun 2021, Pagu Alokasi Anggaran untuk Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

sebesar **Rp. 90,94 miliar**; yang terdiri dari Kegiatan, Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO):

- a. Kegiatan Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan dengan KRO dan RO sebagai berikut:

KRO:

- ABR-Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan
- ABW-Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan
- CAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup
- CAL-Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan
- CBK-Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup
- CBQ-Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan
- DDA-Penelitian dan Pengembangan Produk
- SDA-Penelitian dan Pengembangan Produk

RO:

- 1) 001-Prasarana Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan
- 2) 001-Rekomendasi Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi KP
- 3) 001-Sarana Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan
- 4) 001-Teknologi Adaptif Lokasi (TAL) Hasil Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan yang Diterapkan
- 5) 001-Teknologi Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan
- 6) 002-Teknologi Adaptif Lokasi (TAL) Hasil Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan yang Diterapkan
- 7) 003-Data dan/atau Informasi Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi KP

- b. Kegiatan Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan dengan KRO dan RO sebagai berikut:

KRO:

- ABR-Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan
- ABW-Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan
- CAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup
- CAL-Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan
- CBK-Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup
- CBQ-Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan
- DDC-Penelitian dan Pengembangan Modeling
- SDC-Penelitian dan Pengembangan Modeling

RO:

- 1) 001-Model Integrasi Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan yang diterapkan
- 2) 001-Model Sosial Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan
- 3) 001-Prasarana Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
- 4) 001-Prasarana Riset Sosial Ekonomi KP
- 5) 001-Rekomendasi Kebijakan Hasil Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
- 6) 001-Rekomendasi Kebijakan Hasil Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
- 7) 001-Sarana Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
- 8) 002-Data dan atau Informasi Hasil Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
- 9) 002-Data dan/atau Informasi Hasil Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
- 10)002-Model Integrasi Sosial Ekonomi KP yang diterapkan
- 11)950-Sarana Riset Sosial Ekonomi KP

c. Kegiatan Riset Perikanan dengan KRO dan RO sebagai berikut:

KRO:

- ABR-Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan
- AFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria
- DDA-Penelitian dan Pengembangan Produk
- DDB-Penelitian dan Pengembangan Purwarupa
- PBR-Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan
- RAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup
- RAL-Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan
- RBK-Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup
- RBQ-Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan
- SDA-Penelitian dan Pengembangan Produk

RO:

- 1) 001-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Riset Perikanan
- 2) 001-Prasarana Riset Perikanan
- 3) 001-Produk Biologi Hasil Riset Perikanan
- 4) 001-Prototipe Alat dan Mesin Hasil Riset Perikanan
- 5) 001-Rekomendasi Kebijakan Hasil Riset Perikanan
- 6) 001-Sarana Riset Perikanan
- 7) 001-Teknologi Hasil Riset Perikanan
- 8) 002-Data dan/atau Informasi Stok Sumber Daya Perikanan pada Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Negara Republik Indonesia (NRI)
- 9) 002-Produk Biologi Hasil Riset Perikanan

- 10)002-Produk Rekayasa Alat dan Mesin Perikanan Siap Guna
- 11)002-Teknologi Adaptif Lokasi (TAL) Hasil Riset Perikanan yang Diterapkan
- 12)003-Data dan/atau Informasi Stok Sumber Daya Perikanan pada Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Negara Republik Indonesia (NRI) di Perairan Darat
- 13)003-Teknologi Adaptif Lokasi (TAL) Hasil Riset Perikanan yang Diterapkan
- 14)004-Data dan/atau Informasi Hasil Riset Perikanan
- 15)004-Teknologi Hasil Riset Perikanan

d. Kegiatan Riset Kelautan dengan KRO dan RO sebagai berikut:

KRO:

- ABW-Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan
- AFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria
- DDA-Penelitian dan Pengembangan Produk
- DDB-Penelitian dan Pengembangan Purwarupa
- PBR-Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan
- PBW-Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan
- RAG-Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup
- RAL-Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan
- RBK-Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup
- RBQ-Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan

RO:

- 1) 001-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Riset Kelautan
- 2) 001-Prasarana Riset Kelautan
- 3) 001-Prototipe Alat dan Mesin Hasil Riset dan Perekayasaan Kelautan
- 4) 001-Rekomendasi Kebijakan Hasil Riset Kelautan
- 5) 001-Sarana Riset Kelautan
- 6) 001-Teknologi Adaptif Lokasi (TAL) Hasil Riset Kelautan yang diterapkan
- 7) 002-Alat dan Mesin hasil Riset dan Perekayasaan Kelautan Siap Guna
- 8) 002-Data dan/atau Informasi Pemetaan Sumberdaya Kawasan Pesisir
- 9) 002-Sarana Riset Data Citra Satelit Radar
- 10)003-Data dan/atau Informasi Pemetaan karakteristik dan dinamika laut di WPP
- 11)003-Sarana Riset Pemodelan Laut

8. Program Dukungan Manajemen

Sesuai dengan hasil Rapat Kerja Menteri Kelautan dan Perikanan tanggal 22 September 2020 tentang Penyesuaian RKA-K/L KKP Tahun 2021, Pagu Alokasi Anggaran untuk Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sebesar **Rp. 3.443,89 miliar**; yang terdiri dari Kegiatan, Klasifikasi Rincian Output (KRO) dan Rincian Output (RO):

- a. Kegiatan Legislasi, Litigasi dan Kerjasama dengan KRO dan RO sebagai berikut:

KRO:

AEC-Kerja sama

AFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria

EAG-Layanan Hukum

RO:

- 1) 001-Kerja Sama Internasional
- 2) 001-Layanan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan
- 3) 001-NSPK Bidang Legislasi, Litigasi dan Kerjasama
- 4) 002-Kesepakatan Kerja Sama Antar Lembaga
- 5) 002-Layanan Advokasi Hukum
- 6) 003-Layanan Penyusunan Perjanjian

- b. Kegiatan Pengelolaan Organisasi dan SDM dengan KRO dan RO sebagai berikut:

KRO:

- AFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria
- EAF-Layanan SDM
- EAH-Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal

RO:

- 1) 001-Layanan Evaluasi dan Penataan Organisasi di Lingkungan KKP
- 2) 001-Layanan Perencanaan, Pengembangan dan Pembinaan Disiplin Pegawai
- 3) 002-Layanan Ketatalaksanaan
- 4) 002-Layanan Pengangkatan, Kepangkatan, Pemberhentian, Pensiun dan Mutasi
- 5) 003-Layanan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KKP
- 6) 003-Layanan Pengembangan, Pengelolaan dan Pembinaan Jabatan Fungsional
- 7) 004-Layanan Pengelolaan Kinerja Pegawai

- c. Kegiatan Pengelolaan Perencanaan, Keuangan dan BMN dengan KRO dan RO sebagai berikut:

KRO:

- EAB-Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal
- FAE-Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan

RO:

- 1) 001-Laporan Pengelolaan Kinerja Organisasi
- 2) 001-Layanan Perencanaan Umum
- 3) 002-Laporan Program dan Kegiatan
- 4) 002-Layanan Perencanaan Program dan Anggaran
- 5) 003-Laporan Keuangan dan BMN

d. Kegiatan Pengelolaan Komunikasi, Informasi Publik dan Umum dengan KRO dan RO sebagai berikut:

KRO:

- EAA-Layanan Perkantoran
- EAC-Layanan Umum
- EAD-Layanan Sarana Internal
- EAE-Layanan Prasarana Internal
- EAI-Layanan Kehumasan dan Protokoler

RO:

- 1) 001-Gaji dan Tunjangan
- 2) 001-Kendaraan Bermotor
- 3) 001-Layanan Kehumasan
- 4) 001-Layanan Persuratan, TU dan Kearsipan
- 5) 001-Tanah
- 6) 002-Alat Pengolah Data dan Komunikasi
- 7) 002-Gedung dan Bangunan
- 8) 002-Layanan Protokoler
- 9) 002-Layanan Rumah Tangga
- 10)002-Operasional dan Pemeliharaan Kantor
- 11)003-Jalan dan Irigasi
- 12)003-Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- 13)003-Meubelair
- 14)004-Jaringan
- 15)004-Layanan Persuratan dan Tata Usaha pimpinan
- 16)004-Modal Lainnya
- 17)005-Layanan Rapat Pimpinan

e. Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi dengan KRO dan RO sebagai berikut:

KRO:

- AFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria
- BMA-Data dan Informasi Publik
- EAJ-Layanan Data dan Informasi

RO:

- 1) 001-Layanan Data Statistik Kelautan dan Perikanan
- 2) 001-Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum
- 3) 001-NSPK Bidang Data dan Informasi

- 4) 002-Layanan Aplikasi Sistem Informasi
 - 5) 003-Layanan Infrastruktur Teknologi Informasi
- f. Kegiatan Pengawasan Akuntabilitas Aparatur dan Pelaksana Pembangunan KP dengan KRO dan RO sebagai berikut:

KRO:

- AFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria
- EAK-Layanan Pengawasan Internal

RO:

- 1) 001-NSPK Bidang Pengawasan Akuntabilitas Aparatur dan Pelaksana Pembangunan KP
 - 2) 001-Pengawasan Intern pada Mitra Inspektorat I
 - 3) 002-Pengawasan Intern pada Mitra Inspektorat II
 - 4) 003-Pengawasan Intern pada Mitra Inspektorat III
 - 5) 004-Pengawasan Intern pada Mitra Inspektorat IV
 - 6) 005-Pengawasan Intern pada Mitra Inspektorat V dan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu lingkup KKP
 - 7) 006-Laporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan
 - 8) 007-Laporan Pengawasan dengan Mitra APIP
 - 9) 008-Pengawasan Kegiatan Prioritas/Strategis Mitra Inspektorat I (SBK)
 - 10)009-Pengawasan Kegiatan Prioritas/Strategis Mitra Inspektorat II (SBK)
 - 11)010-Pengawasan Kegiatan Prioritas/Strategis Mitra Inspektorat III (SBK)
 - 12)011-Pengawasan Kegiatan Prioritas/Strategis Mitra Inspektorat IV (SBK)
- g. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur KP dengan KRO dan RO sebagai berikut:

KRO:

EAM-Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal

RO:

- 1) 001-Aparatur KKP yang Diberikan Beasiswa
 - 2) 002-Aparatur KKP yang Diberikan Izin Belajar
 - 3) 003-Aparatur Kelautan dan Perikanan yang kompeten
- h. Kegiatan Pengelolaan Modal Usaha Kelautan dan Perikanan dengan KRO dan RO sebagai berikut:

KRO:

BDG-Fasilitasi dan Pembinaan UMKM

BIF-Pengawasan dan Pengendalian Layanan

EAA-Layanan Perkantoran

EAC-Layanan Umum

EAD-Layanan Sarana Internal

FAE-Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan

RO:

- 1) 001-Laporan Pengelolaan Keuangan
 - 2) 001-Layanan Operasional Perkantoran
 - 3) 001-Layanan Pengadaan Peralatan Pengolah Data dan Komputasi, Peralatan Perkantoran serta Peralatan dan Mesin
 - 4) 001-Layanan Pengelolaan Risiko Modal Usaha
 - 5) 001-Layanan Tata Usaha, Rumah Tangga dan Kearsipan
 - 6) 001-UMKM yang Dilayani Permodalan BLU
 - 7) 002-Laporan Pengawasan Internal Pengelolaan Modal Modal Usaha KP
 - 8) 003-Laporan Monitoring dan Evaluasi Program Pengelolaan Dana Bergulir
- i. Kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup Eselon I dengan KRO dan RO sebagai berikut:

KRO:

- AEC-Kerja sama
- AFA-Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria
- EAA-Layanan Perkantoran
- EAB-Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal
- EAC-Layanan Umum
- EAD-Layanan Sarana Internal
- EAE-Layanan Prasarana Internal
- EAF-Layanan SDM
- EAG-Layanan Hukum
- EAH-Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal
- EAI-Layanan Kehumasan dan Protokoler
- EAJ-Layanan Data dan Informasi
- EAL-Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal
- EAM-Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal
- EAN-Pengelolaan Keuangan dan Kinerja Internal
- FAE-Pemantauan dan Evaluasi serta Pelaporan

RO:

- 1) Alat Pengolah Data dan Komunikasi Lingkup Eselon I
- 2) Gaji dan Tunjangan Lingkup Eselon I
- 3) Gedung dan Bangunan Lingkup Eselon I
- 4) Jalan dan Irigasi Lingkup Eselon I
- 5) Jaringan Lingkup Eselon I
- 6) Kendaraan Bermotor Lingkup Eselon I
- 7) Kerjasama Lingkup Eselon I
- 8) Kesepakatan Kerjasama Antarlembaga Lingkup Eselon I
- 9) Kesepakatan Kerjasama Internasional Lingkup Eselon I

- 10) Laporan Keuangan dan BMN Lingkup Eselon I
- 11) Laporan Pengelolaan Kinerja Organisasi Lingkup Eselon I
- 12) Laporan Program dan Kegiatan Lingkup Eselon I
- 13) Layanan Advokasi Hukum
- 14) Layanan Aparatur Lingkup Eselon I
- 15) Layanan Aplikasi Sistem Informasi
- 16) Layanan Data dan Informasi Lingkup Eselon I
- 17) Layanan Data Statistik Kelautan dan Perikanan Lingkup Eselon I
- 18) Layanan Evaluasi dan Penataan Organisasi Lingkup Eselon I
- 19) Layanan Hukum Lingkup Eselon I
- 20) Layanan Kehumasan Lingkup Eselon I
- 21) Layanan Ketatalaksanaan Lingkup Eselon I
- 22) Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal Lingkup Eselon I
- 23) Layanan Operasional Perkantoran Lingkup Eselon I
- 24) Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal Lingkup Eselon I
- 25) Layanan Pelaksanaan Anggaran Lingkup Eselon I
- 26) Layanan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Lingkup Eselon I
- 27) Layanan Pengadaan Alat Pengolah Data dan Informasi
- 28) Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Lingkup Eselon I
- 29) Layanan Pengadaan Kendaraan Bermotor
- 30) Layanan Pengangkatan, Kepangkatan, Pemberhentian, Pensiun dan Mutasi Lingkup Eselon I
- 31) Layanan Pengelolaan Kinerja Pegawai Lingkup Eselon I
- 32) Layanan Pengembangan, Pengelolaan dan Pembinaan Jabatan Fungsional Lingkup Eselon I
- 33) Layanan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Lingkup Eselon I
- 34) Layanan Persuratan dan Tata Usaha Pimpinan Lingkup Eselon I
- 35) Layanan Prasarana Internal Lingkup Eselon I

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

EDHY PRABOWO

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
 REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR /KEPMEN-KP/2020
 TENTANG
 RENCANA KERJA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN
 PERIKANAN TAHUN 2021

MENJADI (USULAN PEMUTAKHIRAN RENJA 2021)										
PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (RO)	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	INDIKASI PENDANAAN (RP. JUTA)	PRIORITAS NASIONAL	PROYEK PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS NASIONAL	KODE KRO	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT (KRO)
Program Dukungan Manajemen				6.844,8						
Pengelolaan Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri				6.844,8						
Kerjasama Internasional bidang Kelautan dan Perikanan	Tersedianya layanan kerjasama internasional	1	Kesepakatan	6.844,8	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri	Penguatan Kerjasama Pembangunan Internasional	Peningkatan penggunaan sumber-sumber dan mekanisme pendanaan baru kerjasama pembangunan internasional	C PE	Kerja sama
Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi				361.510,4						
Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan				141.226,6						
Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih	Jumlah masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih	29.000	Orang	23.200,0	PN 01 : Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP 04 : Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan	KP 05 : Peningkatan SDM dan riset kemaritiman dan kelautan serta database kelautan dan perikanan	PRO-P 01 : Peningkatan SDM kelautan dan perikanan	C SC	Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan

MENJADI (USULAN PEMUTAKHIRAN RENJA 2021)

PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (RO)	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	INDIKASI PENDANAAN (RP. JUTA)	PRIORITAS NASIONAL	PROYEK PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS NASIONAL	KODE KRO	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT (KRO)
Kelompok Pelaku Utama/Usaha yang Mendapatkan Pendampingan dari Penyuluh KP	Jumlah Kelompok Pelaku utama/ Pelaku Usaha yang disuluh	41.000	Kelompok Masyarakat	87.414,8	PN 01 : Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP 04 : Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan	KP 05 : Peningkatan SDM dan riset kemaritiman dan kelautan serta database kelautan dan perikanan	PRO-P 01 : Peningkatan SDM kelautan dan perikanan	D QD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat
Sarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Sarana pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar	8	Unit	15.367,0	PN 01 : Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP 04 : Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan	KP 05 : Peningkatan SDM dan riset kemaritiman dan kelautan serta database kelautan dan perikanan	PRO-P 01 : Peningkatan SDM kelautan dan perikanan	L RA	Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan
Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Prasarana pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar	7	Unit	15.244,8	PN 01 : Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP 04 : Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan	KP 05 : Peningkatan SDM dan riset kemaritiman dan kelautan serta database kelautan dan perikanan	PRO-P 01 : Peningkatan SDM kelautan dan perikanan	Q RB	Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan
Pendidikan Kelautan dan Perikanan				220.283,9						
KP Kajian Pendidikan Tinggi	Kajian Pendidikan Tinggi KP	16	Produk	2.120,4	PN 03 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP 07 : Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing	KP 01 : Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Berbasis Kerjasama Industri	02 : Reformasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	A SD	Penelitian dan Pengembangan Produk
Kelompok Masyarakat Yang Mendapatkan Penerapan Ilmu Pengetahuan Atau Teknologi Pendidikan Tinggi	Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat KP	17	Kelompok Masyarakat	1.174,3	PN 03 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP 07 : Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing	KP 01 : Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Berbasis Kerjasama Industri	02 : Reformasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	D QD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat
Peserta Pendidikan Vokasi Kelautan dan Perikanan Yang Kompeten	Tersedianya peserta pendidikan vokasi kelautan dan perikanan yang kompeten	8.308	Orang	121.637,2	PN 03 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP 07 : Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing	KP 01 : Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Berbasis Kerjasama Industri	02 : Reformasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	C SA	Pendidikan Vokasi Bidang Pertanian dan Perikanan
Sarana Pendidikan KP	Tersedianya sarana pendidikan KP	16	Paket	28.305,9	PN 03 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP 07 : Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing	KP 01 : Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Berbasis Kerjasama Industri	02 : Reformasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	A RA	Sarana Bidang Pendidikan

MENJADI (USULAN PEMUTAKHIRAN RENJA 2021)

PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (RO)	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	INDIKASI PENDANAAN (RP. JUTA)	PRIORITAS NASIONAL	PROYEK PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS NASIONAL	KODE KRO	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT (KRO)
Prasarana Pendidikan Menengah KP	Tersedianya prasarana pendidikan menengah KP	5	Unit	23.266,1	PN 03 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP 07 : Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing	KP 01 : Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Berbasis Kerjasama Industri	02 : Reformasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	RBI	Prasarana Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah
Prasarana Pendidikan Tinggi KP	Tersedianya prasarana pendidikan tinggi KP	10	Unit	43.780,0	PN 03 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	PP 07 : Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing	KP 01 : Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Berbasis Kerjasama Industri	02 : Reformasi Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	RBJ	Prasarana Bidang Pendidikan Tinggi
Program Kualitas Lingkungan Hidup				84.104,5						
Perlindungan, Pelestarian Dan Pemanfaatan Kawasan Konservasi Dan Keanekaragaman Hayati Laut				57.385,0						
Kawasan Konservasi yang dimanfaatkan Secara Berkelanjutan	Luas kawasan konservasi yang dimanfaatkan secara berkelanjutan (kumulatif)	12.500.000	Hektar	700,0	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan	Peningkatan ekosistem kelautan dan pemanfaatan jasa kelautan	Pengembangan wisata bahari dan jasa maritim	A RE	Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem
Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil Baru yang Ditetapkan	Luas Kawasan Konservasi Baru	800.000	Hektar	1.500,0	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Pencegahan Kehilangan Keanekaragaman Hayati dan Kerusakan Ekosistem	A RE	Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem

MENJADI (USULAN PEMUTAKHIRAN RENJA 2021)

PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (RO)	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	INDIKASI PENDANAAN (RP. JUTA)	PRIORITAS NASIONAL	PROYEK PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS NASIONAL	KODE KRO	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT (KRO)
Kawasan Konservasi Perairan, Pesisir dan Pulau - Pulau Kecil yang Operasional	Kawasan konservasi perairan, pesisir dan pulau-pulau kecil yang operasional (Kumulatif)	12.500.000	Hektar	21.311,0	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Pencegahan Kehilangan Keanekaragaman Hayati dan Kerusakan Ekosistem	A RE	Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem
Jejaring dan Kemitraan Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut	Jejaring dan Kemitraan Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut yang disepakati	3	Kesepakatan	2.075,0	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Pencegahan Kehilangan Keanekaragaman Hayati dan Kerusakan Ekosistem	E PE	Kemitraan
Kerjasama Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut	Dokumen Kerjasama Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut yang disepakati	2	Kesepakatan	925,0	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Pencegahan Kehilangan Keanekaragaman Hayati dan Kerusakan Ekosistem	C PE	Kerjasama
Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat di SKPT Kepulauan Mentawai	Kelompok Masyarakat di SKPT Kepulauan Mentawai yang difasilitasi pembinaannya	10	Kelompok Masyarakat	581,1	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Wilayah Sumatera	Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	Percepatan Pembangunan daerah tertinggal di Provinsi Sumatera Barat	D QD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat
OM Prasarana SKPT Kepulauan Mentawai	SKPT Kepulauan Mentawai yang didukung operasional prasarannya	12	Unit	718,9	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Wilayah Sumatera	Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	Percepatan Pembangunan daerah tertinggal di Provinsi Sumatera Barat	Q RD	OM Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan dan Perikanan

MENJADI (USULAN PEMUTAKHIRAN RENJA 2021)

PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (RO)	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	INDIKASI PENDANAAN (RP. JUTA)	PRIORITAS NASIONAL	PROYEK PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS NASIONAL	KODE KRO	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT (KRO)
Keanekaragaman Hayati Perairan Terancam Punah yang Dilindungi dan/atau Dilestarikan	Keanekaragaman hayati perairan yang dilindungi dan/atau dilestarikan	10	Jenis/Spesies	4.468,0	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Pencegahan Kehilangan Keanekaragaman Hayati dan Kerusakan Ekosistem	RE B	Konservasi Jenis/Spesies

MENJADI (USULAN PEMUTAKHIRAN RENJA 2021)

PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (RO)	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	INDIKASI PENDANAAN (RP. JUTA)	PRIORITAS NASIONAL	PROYEK PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS NASIONAL	KODE KRO	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT (KRO)
Keanekaragaman Hayati Perairan yang dikelola pemanfaatannya secara Berkelanjutan	Keanekaragaman Hayati Perairan yang dimanfaatkan secara Berkelanjutan	7	Jenis/Spesies	9.600,0	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Pencegahan Kehilangan Keanekaragaman Hayati dan Kerusakan Ekosistem	B RE	Konservasi Jenis/Spesies
Izin Kegiatan Pemanfaatan di Kawasan Konservasi	Kegiatan Pemanfaatan di Kawasan Konservasi yang dilayani perizinannya	10	Layanan	2.225,0	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan	Peningkatan ekosistem kelautan dan pemanfaatan jasa kelautan	Pengembangan wisata bahari dan jasa maritim	H QA	Pelayanan Publik Lainnya
Rekomendasi Konvensi Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut	Konvensi Konservasi Keanekaragaman Hayati Laut yang diberikan rekomendasinya	6	Rekomendasi Kebijakan	900,0	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Pencegahan Kehilangan Keanekaragaman Hayati dan Kerusakan Ekosistem	R PB	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan
Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi	Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi yang diberikan bantuannya	30	Kelompok Masyarakat	6.632,9	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Pencegahan Kehilangan Keanekaragaman Hayati dan Kerusakan Ekosistem	H QE	Bantuan Kelompok Masyarakat
Dokumen NSPK Konservasi dan keanekaragaman Hayati Laut	NSPK Konservasi dan keanekaragaman Hayati Laut yang disusun dokumennya	9	NSPK	5.748,2	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Pencegahan Kehilangan Keanekaragaman Hayati dan Kerusakan Ekosistem	A PF	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria
Pencegahan dan Pemulihan Kerusakan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil				26.719,5						
Prasarana Kawasan Pesisir Tangguh	Prasarana Kawasan Pesisir Tangguh yang dibangun	2	unit	3.311,3	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim	Peningkatan Ketahanan Iklim	Perlindungan Kerentanan Pesisir dan Sektor Kelautan	H RB	Prasarana Bidang Pengendalian Bencana

MENJADI (USULAN PEMUTAKHIRAN RENJA 2021)

PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (RO)	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	INDIKASI PENDANAAN (RP. JUTA)	PRIORITAS NASIONAL	PROYEK PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS NASIONAL	KODE KRO	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT (KRO)
Prasarana Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi	2	unit	2.000,0	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim	Peningkatan Ketahanan Iklim	Perlindungan Kerentanan Pesisir dan Sektor Kelautan	Q RB	Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan dan Perikanan
Prasarana Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim	Prasarana Mitigasi Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim yang dibangun	4	unit	1.396,7	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim	Peningkatan Ketahanan Iklim	Perlindungan Kerentanan Pesisir dan Sektor Kelautan	H RB	Prasarana Bidang Pengendalian Bencana
Kawasan mangrove yang direhabilitasi	Luas kawasan mangrove di pesisir dan pulau-pulau kecil yang direhabilitasi	400	Hektar	13.719,5	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim	Peningkatan Ketahanan Iklim	Perlindungan Kerentanan Pesisir dan Sektor Kelautan	A RE	Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem
Vegetasi pantai yang ditanami untuk mitigasi bencana	Luas Vegetasi pantai yang ditanami untuk mitigasi bencana	10	Hektar	2.292,0	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim	Peningkatan Ketahanan Iklim	Perlindungan Kerentanan Pesisir dan Sektor Kelautan	A RE	Konservasi Kawasan/Rehabilitasi Ekosistem
Sarana Penanggulangan Pencemaran Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Sarana Penanggulangan Pencemaran Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang difasilitasi	2	Unit	1.227,5	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Penanganan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan	Q RB	Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan dan Perikanan
Prasarana Penanggulangan Pencemaran Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Prasarana Penanggulangan Pencemaran Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dibangun	4	unit	2.772,5	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Penanganan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan		
Program Pengelolaan Perikanan dan Kelautan				2.130.120,1						
Pengelolaan Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan dan Pengawakan Kapal Perikanan				46.250,0						

MENJADI (USULAN PEMUTAKHIRAN RENJA 2021)

PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (RO)	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	INDIKASI PENDANAAN (RP. JUTA)	PRIORITAS NASIONAL	PROYEK PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS NASIONAL	KODE KRO	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT (KRO)
Kapal perikanan bantuan yang disalurkan	Jumlah kapal perikanan bantuan yang terbangun	97	Unit	38.000,0	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan	Peningkatan produksi, produktivitas, standarisasi mutu dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan	Peningkatan Produksi Perikanan	G QE	Bantuan Peralatan / Sarana
Alat penangkapan ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan bantuan yang disalurkan	Jumlah alat penangkap ikan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang disalurkan	750	Unit	7.500,0	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan	Peningkatan produksi, produktivitas, standarisasi mutu dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan	Peningkatan Produksi Perikanan	G QE	Bantuan Peralatan / Sarana
Tata kelola kelembagaan dan operasional SKPT Saumlaki yang mandiri	Jumlah SKPT Saumlaki yang dikelola kelembagaan dan operasionalnya secara mandiri	1	Lembaga	750,0	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Wilayah Maluku	Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	Percepatan Pembangunan daerah tertinggal di Provinsi Maluku	A QG	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi
Pengelolaan Pelabuhan Perikanan				117.543,8						

MENJADI (USULAN PEMUTAKHIRAN RENJA 2021)

PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (RO)	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	INDIKASI PENDANAAN (RP. JUTA)	PRIORITAS NASIONAL	PROYEK PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS NASIONAL	KODE KRO	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT (KRO)
Kajian Rencana Pembangunan Pelabuhan Perikanan yang terintegrasi dan bertaraf internasional yang disusun	Jumlah Kajian Rencana Pembangunan Pelabuhan Perikanan yang terintegrasi dan bertaraf internasional yang tersusun	6	Unit	15.323,7	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan	Peningkatan produksi, produktivitas, standarisasi mutu dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan	Peningkatan Produksi Perikanan	Q RB	Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan dan Perikanan
Tata kelola kelembagaan dan operasional SKPT Merauke yang mandiri	Jumlah SKPT Merauke yang dikelola kelembagaan dan operasionalnya secara mandiri	1	Lembaga	1.000,0	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Pengembangan Wilayah Papua	Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Merauke	A QG	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi
Pengelolaan Perizinan dan Kenelayanan				71.076,8						
Izin alokasi usaha perikanan tangkap (SIUP) yang diterbitkan	Jumlah Alokasi Izin yang Diterbitkan	9.600	Produk	2.200,0	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan	Peningkatan fasilitasi usaha, pembiayaan, dan akses perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil serta akses terhadap pengelolaan sumber daya	Penataan Perizinan Kelautan dan Perikanan	A PC	Perizinan Produk
Sistem perizinan pusat-daerah yang terintegrasi	Jumlah provinsi dan UPT Pusat yang mengintegrasikan sistem perizinan pusat-daerah	34	Provinsi	7.126,8	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan	Peningkatan fasilitasi usaha, pembiayaan, dan akses perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil serta akses terhadap pengelolaan sumber daya	Penataan Perizinan Kelautan dan Perikanan	A UB	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah
Bantuan Premi Asuransi Nelayan yang disalurkan	Jumlah bantuan premi asuransi nelayan yang tersalurkan	120.000	Orang	21.600,0	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan	Peningkatan fasilitasi usaha, pembiayaan, dan akses perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil serta akses terhadap pengelolaan sumber daya	Peningkatan Perlindungan Nelayan dan Pembudidaya Ikan	A QE	Bantuan Masyarakat

MENJADI (USULAN PEMUTAKHIRAN RENJA 2021)

PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (RO)	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	INDIKASI PENDANAAN (RP. JUTA)	PRIORITAS NASIONAL	PROYEK PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS NASIONAL	KODE KRO	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT (KRO)
Nelayan yang difasilitasi akses pendanaan usahanya	Jumlah nelayan yang terfasilitasi pendanaan usaha perikanan tangkap	1.500	Orang	2.400,0	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan	Peningkatan fasilitasi usaha, pembiayaan, dan akses perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil serta akses terhadap pengelolaan sumber daya	Peningkatan Akses Pembiayaan Usaha Perikanan	C QD	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat
Kelompok Usaha Bersama yang diidentifikasi untuk ditingkatkan kapasitas kelembagaannya	Jumlah Kelompok Usaha Bersama yang diidentifikasi untuk ditingkatkan kapasitas kelembagaannya	2.400	Kelompok Masyarakat	632,2	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan	Peningkatan fasilitasi usaha, pembiayaan, dan akses perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil serta akses terhadap pengelolaan sumber daya	Peningkatan Akses Pembiayaan Usaha Perikanan	D QD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat
Kelompok Usaha Bersama yang meningkat kapasitas kelembagaannya	Jumlah Kelompok Usaha Bersama yang meningkat kapasitas kelembagaannya	2.400	Kelompok Masyarakat	1.367,8	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan	Peningkatan fasilitasi usaha, pembiayaan, dan akses perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil serta akses terhadap pengelolaan sumber daya	Peningkatan Akses Pembiayaan Usaha Perikanan	D QD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat
Kampung nelayan yang diidentifikasi untuk difasilitasi penataannya	Kampung nelayan yang diidentifikasi untuk difasilitasi penataannya	40	Kelompok Masyarakat	713,9	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan	Peningkatan fasilitasi usaha, pembiayaan, dan akses perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil serta akses terhadap pengelolaan sumber daya	Peningkatan Akses Pembiayaan Usaha Perikanan	D QD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat
Kampung nelayan yang difasilitasi penataannya	Jumlah kampung nelayan yang difasilitasi penataannya	40	Kelompok Masyarakat	1.286,2	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan	Peningkatan fasilitasi usaha, pembiayaan, dan akses perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil serta akses terhadap pengelolaan sumber daya	Peningkatan Akses Pembiayaan Usaha Perikanan	D QD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat

MENJADI (USULAN PEMUTAKHIRAN RENJA 2021)

PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (RO)	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	INDIKASI PENDANAAN (RP. JUTA)	PRIORITAS NASIONAL	PROYEK PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS NASIONAL	KODE KRO	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT (KRO)
Tata kelola kelembagaan dan operasional SKPT Natuna yang mandiri	Jumlah SKPT Natuna yang dikelola kelembagaan dan operasionalnya secara mandiri	1	Lembaga	750,0	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Wilayah Sumatera	Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Ranai	A QG	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi
Bidang tanah nelayan yang diidentifikasi untuk difasilitasi sertifikatnya	Jumlah identifikasi bidang tanah nelayan untuk difasilitasi sertifikasinya	7.500	Orang	1.375,0	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan	Peningkatan fasilitasi usaha, pembiayaan, dan akses perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil serta akses terhadap pengelolaan sumber daya	Peningkatan Akses Pembiayaan Usaha Perikanan	C QD	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat
Bidang tanah nelayan yang difasilitasi sertifikatnya	Jumlah fasilitasi sertifikasi hak atas tanah nelayan (SeHAT)	7.500	Orang	1.125,0	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan	Peningkatan fasilitasi usaha, pembiayaan, dan akses perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil serta akses terhadap pengelolaan sumber daya	Peningkatan Akses Pembiayaan Usaha Perikanan	C QD	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat
Nelayan yang difasilitasi pengembangan usahanya	Jumlah fasilitasi pengembangan usaha nelayan	2.000	Orang	3.500,0	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan	Peningkatan fasilitasi usaha, pembiayaan, dan akses perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil serta akses terhadap pengelolaan sumber daya	Peningkatan Akses Pembiayaan Usaha Perikanan	C QD	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat
Kampung nelayan yang ditingkatkan fasilitasnya (Kampung Nelayan Maju/Kalaju)	Jumlah kawasan kampung nelayan yang ditingkatkan fasilitasnya (Kampung Nelayan Maju/Kalaju)	40	Kelompok Masyarakat	27.000,0	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan	Peningkatan fasilitasi usaha, pembiayaan, dan akses perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil serta akses terhadap pengelolaan sumber daya	Peningkatan Akses Pembiayaan Usaha Perikanan	H QE	Bantuan Kelompok Masyarakat
Pengelolaan Sumber Daya Ikan				13.600,0						

MENJADI (USULAN PEMUTAKHIRAN RENJA 2021)

PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (RO)	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	INDIKASI PENDANAAN (RP. JUTA)	PRIORITAS NASIONAL	PROYEK PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS NASIONAL	KODE KRO	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT (KRO)
SDI Laut Pedalaman, Teritorial dan Perairan Kepulauan yang dikelola dan dimanfaatkan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan SDI di Laut Pedalaman, Teritorial dan Perairan Kepulauan yang dikelola dan dimanfaatkan	3	Rekomendasi Kebijakan	1.050,0	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan	Peningkatan pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir serta pengelolaan ruang laut	Pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP)	R PB	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan
Prasarana Perikanan Tangkap Perairan Darat yang di tingkatkan fasilitasnya	Jumlah Prasarana Perikanan Tangkap perairan darat yang ditingkatkan fasilitasnya	3	Unit	4.500,0	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan	Peningkatan pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir serta pengelolaan ruang laut	Pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP)	Q RB	Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup
Prasarana Pemulihan Sumber Daya Ikan Berkelanjutan yang dibangun	Jumlah Prasarana Pemulihan Sumber Daya Ikan Berkelanjutan yang dibangun	5	Unit	1.500,0	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan	Peningkatan pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir serta pengelolaan ruang laut	Pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP)	Q RB	Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup
Data Log Book penangkapan Ikan yang diolah dan dianalisis	Jumlah rekomendasi kebijakan dari Data Log Book Penangkapan Ikan yang diolah dan dianalisis	11	Rekomendasi Kebijakan	1.565,0	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan	Peningkatan produksi, produktivitas, standarisasi mutu dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan	Peningkatan Produksi Perikanan	R PB	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan
Data logbook penangkapan Ikan yang dikumpulkan dan diverifikasi	Jumlah Laporan Data Log Book yang telah dikumpulkan dan diverifikasi di Pelabuhan Perikanan.	7.000	Laporan	1.185,0	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan	Peningkatan produksi, produktivitas, standarisasi mutu dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan	Peningkatan Produksi Perikanan	R PB	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan

MENJADI (USULAN PEMUTAKHIRAN RENJA 2021)

PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (RO)	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	INDIKASI PENDANAAN (RP. JUTA)	PRIORITAS NASIONAL	PROYEK PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS NASIONAL	KODE KRO	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT (KRO)	
Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang operasional	Jumlah Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang operasional	11	Lembaga	1.600,0	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan	Peningkatan pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir serta pengelolaan ruang laut	Pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP)	A	QG	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi
Lembaga Pengelola Perikanan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) yang menjadi model pencontohan	Jumlah Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI yang menjadi model percontohan (kumulatif)	5	Lembaga	1.500,0	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan	Peningkatan pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir serta pengelolaan ruang laut	Pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP)	A	QG	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi
Tata kelola kelembagaan dan operasional SKPT Sebatik yang mandiri	Jumlah SKPT Sebatik yang dikelola kelembagaan dan operasionalnya secara mandiri	1	Lembaga	700,0	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Wilayah Kalimantan	Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Nunukan	A	QG	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Ekonomi
Pengelolaan Perbenihan Ikan				195.575,7							
Calon Induk Unggul yang disalurkan ke masyarakat	Jumlah Calon Induk Unggul yang didistribusikan ke masyarakat	300.000	Ekor	13.029,8	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan	Peningkatan produksi, produktivitas, standarisasi mutu dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan	Peningkatan Produksi Perikanan	L	QE	Bantuan Hewan
Calon Induk Unggul Ikan Air Tawar yang diproduksi	Jumlah Calon Induk Unggul Ikan Air Tawar yang diproduksi (satuan ekor)	372.460	Unit	10.830,5	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan	Peningkatan produksi, produktivitas, standarisasi mutu dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan	Peningkatan Produksi Perikanan	L	RA	Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan

MENJADI (USULAN PEMUTAKHIRAN RENJA 2021)

PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (RO)	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	INDIKASI PENDANAAN (RP. JUTA)	PRIORITAS NASIONAL	PROYEK PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS NASIONAL	KODE KRO	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT (KRO)
Calon Induk Unggul Ikan Air Payau yang diproduksi	Jumlah Calon Induk Unggul Ikan Air Payau yang diproduksi (satuan ekor)	415.350	Unit	19.715,6	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan	Peningkatan produksi, produktivitas, standarisasi mutu dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan	Peningkatan Produksi Perikanan	L RA	Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan
Calon Induk Unggul Ikan Laut yang diproduksi	Jumlah Calon Induk Unggul Ikan Laut yang diproduksi (satuan ekor)	12.190	Unit	3.479,8	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan	Peningkatan produksi, produktivitas, standarisasi mutu dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan	Peningkatan Produksi Perikanan	L RA	Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan
OM Prasarana SKPT Rote Ndao yang sudah dibangun	Jumlah OM Prasarana SKPT Rote Ndao yang sudah dibangun	1	Unit	250,0	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara	Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	Percepatan Pembangunan daerah tertinggal di Provinsi Nusa Tenggara Timur	Q RD	OM Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan
Kelompok Masyarakat di SKPT Rote Ndao yang difasilitasi dan dibina	Jumlah Kelompok Masyarakat di SKPT Rote Ndao yang difasilitasi dan dibina	75	Kelompok Masyarakat	500,0	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara	Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	Percepatan Pembangunan daerah tertinggal di Provinsi Nusa Tenggara Timur	D QD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat
Benih Ikan Air Tawar yang disalurkan ke masyarakat	Jumlah Benih Ikan Air Tawar yang didistribusikan ke masyarakat	49.400.000	Ekor	13.865,3	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan	Peningkatan produksi, produktivitas, standarisasi mutu dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan	Peningkatan Produksi Perikanan	L QE	Bantuan Hewan
Benih Ikan Air Payau yang disalurkan ke masyarakat	#REF!	159.500.000	Ekor	9.631,4	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan	Peningkatan produksi, produktivitas, standarisasi mutu dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan	Peningkatan Produksi Perikanan	L QE	Bantuan Hewan
Benih Ikan Air Laut yang disalurkan ke masyarakat	Jumlah Benih Ikan Laut yang didistribusikan ke masyarakat	8.100.000	Ekor	32.923,3	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan	Peningkatan produksi, produktivitas, standarisasi mutu dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan	Peningkatan Produksi Perikanan	L QE	Bantuan Hewan

MENJADI (USULAN PEMUTAKHIRAN RENJA 2021)

PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (RO)	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	INDIKASI PENDANAAN (RP. JUTA)	PRIORITAS NASIONAL	PROYEK PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS NASIONAL	KODE KRO	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT (KRO)
Bibit Rumput Laut yang disalurkan ke masyarakat	Jumlah Bibit Rumput Laut yang didistribusikan ke masyarakat (satuan kg)	200.000	Unit	6.400,0	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan	Peningkatan produksi, produktivitas, standarisasi mutu dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan	Peningkatan Produksi rumput laut	G QE	Bantuan Peralatan/Sarana
Sarana perbenihan ikan yang disalurkan ke masyarakat	Jumlah Sarana perbenihan ikan yang didistribusikan ke masyarakat	250	Unit	30.500,0	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan	Peningkatan produksi, produktivitas, standarisasi mutu dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan	Peningkatan Produksi rumput laut Peningkatan Produksi Perikanan	G QE	Bantuan Peralatan/Sarana
Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana UPR/HSRT	Jumlah Sarana Prasarana UPR/HSRT yang dibangun/direhabilitasi	20	Unit	6.000,0	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan	Peningkatan produksi, produktivitas, standarisasi mutu dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan	Peningkatan Produksi Perikanan	G QE	Bantuan Peralatan/Sarana
NSPK Bidang Perbenihan Ikan yang disusun	Jumlah NSPK Bidang Perbenihan Ikan yang disusun	18	NSPK	5.250,0	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan	Peningkatan produksi, produktivitas, standarisasi mutu dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan	Peningkatan Produksi Perikanan	A PF	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria

MENJADI (USULAN PEMUTAKHIRAN RENJA 2021)

PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (RO)	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	INDIKASI PENDANAAN (RP. JUTA)	PRIORITAS NASIONAL	PROYEK PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS NASIONAL	KODE KRO	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT (KRO)
Data dan Informasi Bidang Perbenihan yang diolah dan dianalisis	Jumlah Data dan Informasi Bidang Perbenihan yang diolah dan dianalisis	3	Rekomendasi Kebijakan	1.200,0	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan	Peningkatan produksi, produktivitas, standarisasi mutu dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan	Peningkatan Produksi Perikanan	R PB	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan
Pusat Produksi Benih dan Induk yang dikembangkan	Jumlah Pusat Produksi Benih dan Induk yang dikembangkan	2	Unit	42.000,0	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan	Peningkatan produksi, produktivitas, standarisasi mutu dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan	Peningkatan Produksi Perikanan	Q RB	Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan
Pengelolaan Kawasan dan Kesehatan Ikan				474.442,4						
Sarana kawasan dan kesehatan ikan yang disalurkan ke masyarakat	Jumlah Sarana kawasan dan kesehatan ikan yang didistribusikan ke masyarakat	120	Unit	135.240,0	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan	Peningkatan produksi, produktivitas, standarisasi mutu dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan	Peningkatan Produksi Perikanan	G QE	Bantuan Peralatan/Sarana

MENJADI (USULAN PEMUTAKHIRAN RENJA 2021)

PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (RO)	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	INDIKASI PENDANAAN (RP. JUTA)	PRIORITAS NASIONAL	PROYEK PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS NASIONAL	KODE KRO	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT (KRO)
Irigasi perikanan yang dikelola secara partisipatif (PITAP)	Jumlah Irigasi perikanan yang dikelola secara partisipatif (PITAP)	55	Unit	22.000,0	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan	Peningkatan produksi, produktivitas, standarisasi mutu dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan	Peningkatan Produksi Perikanan	Q RB	Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan
Kluster kawasan tambak Udang dan Bandeng yang dikembangkan (Major Project)	Jumlah Kluster kawasan tambak Udang dan Bandeng yang dikembangkan	28	Unit	215.740,0	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan	Peningkatan produksi, produktivitas, standarisasi mutu dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan	Peningkatan Produksi Perikanan	Q RB	Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan
Kluster Kawasan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya yang dikembangkan	Jumlah Kluster Kawasan Komoditas Unggulan Perikanan Budidaya yang dikembangkan	2	Unit	700,0	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan	Peningkatan produksi, produktivitas, standarisasi mutu dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan	Peningkatan Produksi Perikanan	Q RB	Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan
Sampel Monitoring Residu yang diuji	Jumlah Sampel Monitoring Residu yang diuji	7.840	Sampel	19.600,0	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan	Peningkatan produksi, produktivitas, standarisasi mutu dan nilai tambah	Peningkatan Produksi Perikanan	C QJ	Penyidikan dan Pengujian Penyakit

MENJADI (USULAN PEMUTAKHIRAN RENJA 2021)

PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (RO)	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	INDIKASI PENDANAAN (RP. JUTA)	PRIORITAS NASIONAL	PROYEK PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS NASIONAL	KODE KRO	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT (KRO)
							produk kelautan dan perikanan			
Sampel Surveillance Penyakit Ikan yang diuji	Jumlah Sampel Surveillance Penyakit Ikan yang diuji	1.500	Sampel	2.250,0	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan	Peningkatan produksi, produktivitas, standarisasi mutu dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan	Peningkatan Produksi Perikanan	C QJ	Penyidikan dan Pengujian Penyakit
Prasarana produksi di Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang direhabilitasi dan ditingkatkan	Jumlah Prasarana produksi di Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang direhabilitasi dan ditingkatkan	17	Unit	55.712,4	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan	Peningkatan produksi, produktivitas, standarisasi mutu dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan	Peningkatan Produksi Perikanan	Q RB	Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan
Peralatan Laboratorium pengujian penyakit dan lingkungan yang disediakan	Jumlah Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan	15	Unit	12.500,0	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan	Peningkatan produksi, produktivitas, standarisasi mutu dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan	Peningkatan Produksi Perikanan	L RA	Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan
NSPK Kawasan dan Kesehatan Ikan yang disusun	Jumlah NSPK Kawasan dan Kesehatan Ikan yang disusun	11	NSPK	6.400,0	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan	Peningkatan produksi, produktivitas, standarisasi mutu dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan	Peningkatan Produksi Perikanan	A PF	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria
Data dan Informasi Bidang Kawasan dan Kesehatan Ikan yang diolah dan dianalisis	Jumlah Data dan Informasi Bidang Kawasan dan Kesehatan Ikan yang diolah dan dianalisis	7	Rekomendasi Kebijakan	4.300,0	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan	Peningkatan produksi, produktivitas, standarisasi mutu dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan	Peningkatan Produksi Perikanan	R PB	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan

MENJADI (USULAN PEMUTAKHIRAN RENJA 2021)

PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (RO)	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	INDIKASI PENDANAAN (RP. JUTA)	PRIORITAS NASIONAL	PROYEK PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS NASIONAL	KODE KRO	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT (KRO)	
Pengelolaan Produksi dan Usaha Pembudidayaan Ikan				103.882,5							
Bantuan Premi Asuransi Usaha Perikanan Budidaya yang disalurkan	Jumlah Bantuan Premi Asuransi Usaha Perikanan Budidaya yang disalurkan	5.000	Orang	3.500,0	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan	Peningkatan fasilitasi usaha, pembiayaan, dan akses perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil serta akses terhadap pengelolaan sumber daya	Peningkatan Perlindungan Nelayan dan Pembudidaya Ikan	A	QE	Bantuan Masyarakat
Sarana produksi usaha yang disalurkan ke masyarakat	Jumlah Sarana produksi usaha yang didistribusikan ke masyarakat	454	Unit	65.300,0	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan	Peningkatan produksi, produktivitas, standarisasi mutu dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan	Peningkatan Produksi Perikanan	G	QE	Bantuan Peralatan/Sarana

MENJADI (USULAN PEMUTAKHIRAN RENJA 2021)

PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (RO)	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	INDIKASI PENDANAAN (RP. JUTA)	PRIORITAS NASIONAL	PROYEK PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS NASIONAL	KODE KRO	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT (KRO)
Sarana budidaya sistem minapadi yang disalurkan ke masyarakat	Jumlah Sarana budidaya sistem minapadi yang didistribusikan ke masyarakat	200	Unit	9.000,0	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan	Peningkatan produksi, produktivitas, standarisasi mutu dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan	Peningkatan Produksi Perikanan	G QE	Bantuan Peralatan/Sarana
Prasarana Produksi dan Usaha yang dikembangkan	Jumlah Prasarana Produksi dan Usaha yang dikembangkan	16	Unit	17.420,0	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan	Peningkatan produksi, produktivitas, standarisasi mutu dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan	Peningkatan Produksi Perikanan	Q RB	Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan

MENJADI (USULAN PEMUTAKHIRAN RENJA 2021)

PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (RO)	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	INDIKASI PENDANAAN (RP. JUTA)	PRIORITAS NASIONAL	PROYEK PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS NASIONAL	KODE KRO	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT (KRO)	
Rekomendasi bidang lahan pembudidaya ikan yang akan disertifikasi	Jumlah Rekomendasi bidang lahan pembudidaya ikan yang akan disertifikasi (satuan bidang)	13.000	Orang	2.000,0	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan	Peningkatan fasilitasi usaha, pembiayaan, dan akses perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil serta akses terhadap pengelolaan sumber daya	Peningkatan Akses Pembiayaan Usaha Perikanan	C	QD	Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat
Kelompok Masyarakat di SKPT Sumba Timur yang difasilitasi dan dibina	Jumlah Kelompok Masyarakat di SKPT Sumba Timur yang difasilitasi dan dibina	75	Kelompok Masyarakat	500,0	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Wilayah Nusa Tenggara	Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	Percepatan Pembangunan daerah tertinggal di Provinsi Nusa Tenggara Timur	D	QD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat
NSPK Produksi dan Usaha yang disusun	Jumlah NSPK Produksi dan Usaha yang disusun	8	NSPK	4.662,5	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan	Peningkatan produksi, produktivitas, standarisasi mutu dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan	Peningkatan Produksi Perikanan	A	PF	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria
Data dan Informasi Produksi dan Usaha yang diolah dan dianalisis	Jumlah Data dan Informasi Produksi dan Usaha yang diolah dan dianalisis	5	Rekomendasi Kebijakan	1.500,0	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan	Peningkatan produksi, produktivitas, standarisasi mutu dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan	Peningkatan Produksi Perikanan	R	PB	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan
Pengelolaan Pakan dan Obat Ikan				50.851,5							

MENJADI (USULAN PEMUTAKHIRAN RENJA 2021)

PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (RO)	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	INDIKASI PENDANAAN (RP. JUTA)	PRIORITAS NASIONAL	PROYEK PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS NASIONAL	KODE KRO	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT (KRO)
Peralatan/sarana pakan dan obat ikan yang disalurkan ke masyarakat	Jumlah Peralatan/sarana pakan dan obat ikan yang didistribusikan ke masyarakat	60	Unit	7.700,0	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan	Peningkatan produksi, produktivitas, standarisasi mutu dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan	Peningkatan Produksi Perikanan	G QE	Bantuan Peralatan/Sarana
Prasarana pakan dan obat ikan yang dikembangkan	Jumlah Prasarana pakan dan obat ikan yang dikembangkan	31	Unit	18.200,0	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan	Peningkatan produksi, produktivitas, standarisasi mutu dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan	Peningkatan Produksi Perikanan	Q RB	Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan
OM Prasarana SKPT Sabang yang sudah dibangun	Jumlah OM Prasarana SKPT Sabang yang sudah dibangun	1	Unit	1.750,0	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Wilayah Sumatera	Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Sabang	Q RD	#REF!

MENJADI (USULAN PEMUTAKHIRAN RENJA 2021)

PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (RO)	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	INDIKASI PENDANAAN (RP. JUTA)	PRIORITAS NASIONAL	PROYEK PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS NASIONAL	KODE KRO	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT (KRO)
Pakan Ikan yang diproduksi untuk operasional Unit Pelaksana Teknis (UPT)	Jumlah Pakan Ikan yang diproduksi untuk operasional Unit Pelaksana Teknis (UPT)(satuan kg)	500.000	Unit	6.416,8	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan	Peningkatan produksi, produktivitas, standarisasi mutu dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan	Peningkatan Produksi Perikanan	L RA	#REF!
Pakan Ikan yang disalurkan ke masyarakat	Jumlah Pakan Ikan yang disalurkan ke masyarakat (Satuan kg)	1.000.000	Unit	12.834,7	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan	Peningkatan produksi, produktivitas, standarisasi mutu dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan	Peningkatan Produksi Perikanan	G QE	Bantuan Peralatan/Sarana
NSPK Pakan dan Obat Ikan yang disusun	Jumlah NSPK Pakan dan Obat Ikan yang disusun	5	NSPK	1.750,0	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan	Peningkatan produksi, produktivitas, standarisasi mutu dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan	Peningkatan Produksi Perikanan	A PF	#REF!
Data dan Informasi Pakan dan Obat Ikan yang diolah dan dianalisis	Jumlah Data dan Informasi Pakan dan Obat Ikan yang diolah dan dianalisis	5	Rekomendasi Kebijakan	2.200,0	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan	Peningkatan produksi, produktivitas, standarisasi mutu dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan	Peningkatan Produksi Perikanan	R PB	#REF!
Logistik Hasil Kelautan dan Perikanan				105.965,0						
Gudang Beku	Jumlah Gudang Beku yang dibangun	1	Unit	22.450,0	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	Peningkatan industri pengolahan berbasis pertanian, kemaritiman, dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir	Pengembangan industri Kemaritiman	Q RB	Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan dan Perikanan
Pabrik Es	Jumlah pabrik es yang dibangun	4	Unit	20.000,0	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	Peningkatan industri pengolahan berbasis pertanian, kemaritiman, dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir	Pengembangan industri Kemaritiman	Q RB	Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan dan Perikanan

MENJADI (USULAN PEMUTAKHIRAN RENJA 2021)

PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (RO)	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	INDIKASI PENDANAAN (RP. JUTA)	PRIORITAS NASIONAL	PROYEK PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS NASIONAL	KODE KRO	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT (KRO)
Gudang Beku Portable	Jumlah Gudang Beku Portable yang diadakan	15	Unit	52.500,0	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	Peningkatan industri pengolahan berbasis pertanian, kemaritiman, dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir	Pengembangan industri Kemaritiman	G QE	Bantuan Peralatan / Sarana
Mobil refrigasi (berpendingin)	Jumlah Mobil refrigasi (berpendingin) yang diadakan	9	Unit	6.725,0	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	Peningkatan industri pengolahan berbasis pertanian, kemaritiman, dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir	Pengembangan industri Kemaritiman	G QE	Bantuan Peralatan / Sarana
Mobil nonrefrigasi (tidak berpendingin)	Jumlah Mobil nonrefrigasi (tidak berpendingin) yang diadakan	6	Unit	1.740,0	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	Peningkatan industri pengolahan berbasis pertanian, kemaritiman, dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir	Pengembangan industri Kemaritiman	G QE	Bantuan Peralatan / Sarana
Lembaga Pengelola SKPT Mimika yang dibina dan dioperasionalkan	Tingkat kemandirian SKPT dibawah tanggung jawab DJ PDS (skala 1-5)	1	Lembaga	1.000,0	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Pengembangan Wilayah Papua	Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	Wilayah Adat Papua : Mee Pago	B QD	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga
Rekomendasi sistem telusur dan logistik Ikan Nasional	Implementasi sistem telusur dan logistik Ikan Nasional (lokasi)	3	Rekomendasi Kebijakan	1.550,0	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	Peningkatan industri pengolahan berbasis pertanian, kemaritiman, dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir	Pengembangan industri Kemaritiman	R PB	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan

MENJADI (USULAN PEMUTAKHIRAN RENJA 2021)

PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (RO)	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	INDIKASI PENDANAAN (RP. JUTA)	PRIORITAS NASIONAL	PROYEK PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS NASIONAL	KODE KRO	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT (KRO)
Investasi dan Keberlanjutan Usaha Hasil Kelautan dan Perikanan				11.158,0						
Lembaga usaha KP yang ditingkatkan kapasitasnya	Jumlah lembaga usaha ha- sil kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kapasi- tasnya (lembaga)	35	Lembaga	1.400,0	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan	Peningkatan fasilitasi usaha, pembiayaan, dan akses perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil serta akses terhadap pengelolaan sumber daya	Peningkatan Akses Pembiayaan Usaha Perikanan	B QD	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga
UMKM KP yang difasilitasi kemitraan usaha dan investasi	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam kegiatan berusaha dan berinvestasi (pelaku usaha)	60	UMKM	800,0	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan	Peningkatan fasilitasi usaha, pembiayaan, dan akses perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil serta akses terhadap pengelolaan sumber daya	Peningkatan Akses Pembiayaan Usaha Perikanan	G QD	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM
UMKM KP yang difasilitasi akses pembiayaan kredit program	Jumlah pelaku usaha yang difasilitasi dalam kegiatan berusaha dan berinvestasi (pelaku usaha)	3.400	UMKM	4.608,0	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan	Peningkatan fasilitasi usaha, pembiayaan, dan akses perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil serta akses terhadap pengelolaan sumber daya	Peningkatan Akses Pembiayaan Usaha Perikanan	G QD	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM
Wirausaha KP yang ditumbuhkan dan/atau dibina	Jumlah wirausaha hasil KP yang ditumbuhkan (wirausaha)	200	UMKM	1.300,0	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan	Peningkatan fasilitasi usaha, pembiayaan, dan akses perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil serta akses terhadap pengelolaan sumber daya	Peningkatan Akses Pembiayaan Usaha Perikanan	G QD	Fasilitasi dan Pembinaan UMKM
Jumlah Lembaga Pengelola SKPT Biak yang dibina dan dioperasionalkan	Tingkat kemandirian Sentra Kelautan dan Perikanan Ter- padu (SKPT) Biak (tingkat kemandirian skala 1- 5)	1	Lembaga	1.250,0	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Pengembang an Wilayah Papua	Pengembang an Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	Wilayah Adat Papua : Saireri	B QD	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga

MENJADI (USULAN PEMUTAKHIRAN RENJA 2021)

PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (RO)	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	INDIKASI PENDANAAN (RP. JUTA)	PRIORITAS NASIONAL	PROYEK PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS NASIONAL	KODE KRO	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT (KRO)
Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Klaster Daya Saing KP	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Klaster Daya Saing KP yang disusun	3	Rekomendasi Kebijakan	1.800,0	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan	Peningkatan fasilitasi usaha, pembiayaan, dan akses perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil serta akses terhadap pengelolaan sumber daya	Peningkatan Akses Pembiayaan Usaha Perikanan	R PB	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan
Penataan dan Pemanfaatan Jasa Kelautan				147.147,2						
Lahan Garam yang difasilitasi	Lahan garam yang terfasilitasi	400	Hektar	52.874,2	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan	Peningkatan produksi, produktivitas, standarisasi mutu dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan	Peningkatan Produksi garam	xxx	Pengembangan Kawasan Produksi
Dokumen NSPK Jasa Kelautan	NSPK Jasa Kelautan yang disusun dokumennya	4	NSPK	909,7	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan	Peningkatan produksi, produktivitas, standarisasi mutu dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan	Peningkatan Produksi garam	A PF	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria
Sarana Niaga Garam Rakyat yang dibangun	Sarana niaga garam rakyat yang direvitalisasi	58	unit	73.923,1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan	Peningkatan produksi, produktivitas, standarisasi mutu dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan	Peningkatan Produksi garam	G QE	Bantuan Peralatan/Sarana
Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Reklamasi	Rekomendasi Kebijakan Pengelolaan Reklamasi yang disusun	3	Rekomendasi Kebijakan	851,0	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, PN06.	Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan; Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim	Peningkatan pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir serta pengelolaan ruang laut; Peningkatan Ketahanan Iklim	Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut; Perlindungan Kerentanan Pesisir dan Sektor Kelautan	R PB	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan
Layanan Perizinan Pengelolaan Reklamasi	Pengelolaan Reklamasi yang dilayani perizinannya	5	Layanan	462,4	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan;	Peningkatan pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan penataan ruang laut	Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut; Perlindungan Kerentanan Pesisir dan Sektor Kelautan	H QA	Pelayanan Publik Lainnya

MENJADI (USULAN PEMUTAKHIRAN RENJA 2021)

PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (RO)	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	INDIKASI PENDANAAN (RP. JUTA)	PRIORITAS NASIONAL	PROYEK PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS NASIONAL	KODE KRO	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT (KRO)
					Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim, PN06.	Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim	dan rencana zonasi pesisir serta pengelolaan ruang laut; Peningkatan Ketahanan Iklim			
Gerai Biofarmakologi yang dibangun	Unit bisnis biofarmakologi yang dibangun	2	unit	690,0	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan	Peningkatan ekosistem kelautan dan pemanfaatan jasa kelautan	Pengembangan marine bioproduct dan bioteknologi	G QE	Bantuan Peralatan/Sarana
Rekomendasi Pemetaan Potensi Biofarmakologi dan Pemanfaatan Air Laut	Rekomendasi Pemetaan Potensi Biofarmakologi dan Pemanfaatan Air Laut yang disusun	4	Rekomendasi Kebijakan	660,0	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan; Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim	Peningkatan pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir serta pengelolaan ruang laut; Peningkatan Ketahanan Iklim	Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut; Perlindungan Kerentanan Pesisir dan Sektor Kelautan	R PB	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan
Sarana prasarana Wisata Bahari	Bantuan sarana prasarana yang dibangun di kawasan wisata bahari	15	unit	12.991,0	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan	Peningkatan ekosistem kelautan dan pemanfaatan jasa kelautan	Pengembangan wisata bahari dan jasa maritim	G QE	Bantuan Peralatan/Sarana
Sarana prasarana BMKT	Bantuan sarana prasarana yang dibangun di kawasan BMKT	2	unit	2.286,0	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan	Peningkatan ekosistem kelautan dan pemanfaatan jasa kelautan	Pengembangan wisata bahari dan jasa maritim	G QE	Bantuan Peralatan/Sarana
OM Prasarana SKPT Kepulauan Talaud	SKPT Kepulauan Talaud yang didukung operasional prasarannya	12	Unit	1.202,6	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Wilayah Sulawesi	Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Melonguane	Q RD	OM Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan dan Perikanan
Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat di SKPT Kepulauan Talaud	Kelompok Masyarakat di SKPT Kepulauan Talaud yang difasilitasi pembinaannya	16	Kelompok Masyarakat	297,5	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Wilayah Sulawesi	Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) Melonguane	D QD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat
Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil				16.800,0						

MENJADI (USULAN PEMUTAKHIRAN RENJA 2021)

PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (RO)	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	INDIKASI PENDANAAN (RP. JUTA)	PRIORITAS NASIONAL	PROYEK PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS NASIONAL	KODE KRO	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT (KRO)
Prasarana/Infrastruktur di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil/Terluar	Pesisir dan pulau - pulau kecil / terluar yang dibangun sarana prasarananya	5	unit	12.000,0	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Wilayah Maluku, Pembangunan Wilayah Sulawesi, Pembangunan Wilayah Sumatera	Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	Pembangunan Desa Terpadu	Q RB	Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan
Prasarana di SKPT Pulau Morotai	SKPT Pulau Morotai yang dibangun prasarananya	2	Unit	861,1	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Wilayah Maluku	Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Morotai	Q RB	Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan
OM Prasarana SKPT Pulau Morotai	SKPT Pulau Morotai yang didukung operasional prasarananya	12	Unit	1.138,9	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan	Pembangunan Wilayah Maluku	Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	Pembangunan Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional Morotai	Q RD	OM Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan dan Perikanan
Masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang diakui dan dikuatkan kelembagaannya	Komunitas masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal di pesisir dan pulau - pulau kecil yang terfasilitasi dalam rangka penguatan dan perlindungannya (kumulatif)	5	Kelompok Masyarakat	2.800,0	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan untuk Memperkuat Karakter dan Memperteguh Jati Diri Bangsa, Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat, dan Mempengaruhi Arah Perkembangan Peradaban Dunia	Pengembangan dan Pemanfaatan Kekayaan Budaya untuk memperkuat karakter bangsa dan kesejahteraan rakyat	Pengembangan budaya bahari dan sumber daya maritim	D QD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat
Perencanaan Ruang Laut				19.800,0						
Pelayanan perizinan berusaha pemanfaatan di laut	Berusaha pemanfaatan di laut yang dilayani perizinannya	7	Layanan	2.300,0	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan	Peningkatan pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir serta pengelolaan ruang laut	Pengendalian Pemanfaatan Ruang Laut	H QA	Pelayanan Publik Lainnya

MENJADI (USULAN PEMUTAKHIRAN RENJA 2021)

PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (RO)	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	INDIKASI PENDANAAN (RP. JUTA)	PRIORITAS NASIONAL	PROYEK PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS NASIONAL	KODE KRO	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT (KRO)
Penyelenggaraan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Dokumen Penyelenggaraan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang dimiliki	8	Daerah	2.000,0	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan	Peningkatan pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir serta pengelolaan ruang laut	Penataan Ruang Laut dan Rencana Zonasi Pesisir	A	UB Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah
Perairan laut antar wilayah yang memiliki Dokumen Rencana Zonasi Kawasan Antar wilayah	Perairan laut antar wilayah yang memiliki dokumen RZ Kawasan Antar wilayah yang ditetapkan melalui Peraturan Perundangan	4	Rekomendasi Kebijakan	3.800,0	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan	Peningkatan pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir serta pengelolaan ruang laut	Penataan Ruang Laut dan Rencana Zonasi Pesisir	R	PB Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan
Perairan KSN yang memiliki Dokumen Rencana Zonasi KSN	Perairan KSN yang memiliki Dokumen Rencana Zonasi KSN yang ditetapkan melalui Peraturan Perundangan	5	Rekomendasi Kebijakan	4.200,0	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan	Peningkatan pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir serta pengelolaan ruang laut	Penataan Ruang Laut dan Rencana Zonasi Pesisir	R	PB Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan

MENJADI (USULAN PEMUTAKHIRAN RENJA 2021)

PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (RO)	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	INDIKASI PENDANAAN (RP. JUTA)	PRIORITAS NASIONAL	PROYEK PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS NASIONAL	KODE KRO	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT (KRO)
Perairan KSNT yang memiliki Dokumen Rencana Zonasi KSNT	Perairan KSNT yang memiliki Dokumen Rencana Zonasi KSNT yang ditetapkan melalui Peraturan Perundangan	13	Rekomendasi Kebijakan	6.000,0	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan	Peningkatan pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir serta pengelolaan ruang laut	Penataan Ruang Laut dan Rencana Zonasi Pesisir	R PB	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan
Prasarana di SKPT Maluku Barat Daya	SKPT Maluku Barat Daya yang dibangun prasarananya	2	Unit	1.500,0	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Pembangunan Wilayah Maluku	Pengembangan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Perdesaan, dan Transmigrasi	Percepatan Pembangunan daerah tertinggal di Provinsi Maluku	Q RB	Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan
Pemantauan, Operasi Armada dan Infrastruktur Pengawasan				682.451,2						
Operasi Kapal Pengawas	Jumlah rata-rata hari operasi kapal pengawas	122	Hari Operasi	298.340,2	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	Penguatan Keamanan Laut	Penguatan Kapasitas Operasi Keamanan Laut	D QH	Operasi Bidang Pengawasan Sumber Daya Alam
Operasi Pesawat Patroli	Persentase pemenuhan bahan dan laporan operasi pesawat patroli	122	Hari Operasi	27.921,4	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	Penguatan Keamanan Laut	Penguatan Kapasitas Operasi Keamanan Laut	D QH	Operasi Bidang Pengawasan Sumber Daya Alam
Operasional Speedboat 6,5 meter (SBK)	Jumlah rata-rata hari operasi Speedboat Pengawas 6,5 Meter	40	Hari Operasi	393,1	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	Penguatan Keamanan Laut	Penguatan Kapasitas Operasi Keamanan Laut	D QH	Operasi Bidang Pengawasan Sumber Daya Alam
Operasional Speed boat 8 meter (SBK)	Jumlah rata-rata hari operasi Speedboat Pengawas 8 Meter	40	Hari Operasi	3.586,0	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	Penguatan Keamanan Laut	Penguatan Kapasitas Operasi Keamanan Laut	D QH	Operasi Bidang Pengawasan Sumber Daya Alam

MENJADI (USULAN PEMUTAKHIRAN RENJA 2021)

PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (RO)	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	INDIKASI PENDANAAN (RP. JUTA)	PRIORITAS NASIONAL	PROYEK PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS NASIONAL	KODE KRO	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT (KRO)
Operasional Speed boat 12 meter (Bensin) (SBK)	Jumlah rata-rata hari operasi Speedboat Pengawas 12 Meter (Bnesin)	40	Hari Operasi	3.110,1	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	Penguatan Keamanan Laut	Penguatan Kapasitas Operasi Keamanan Laut	D QH	Operasi Bidang Pengawasan Sumber Daya Alam
Operasional Speed boat 12 meter (Solar) (SBK)	Jumlah rata-rata hari operasi Speedboat Pengawas 12 Meter (Solar)	40	Hari Operasi	7.947,9	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	Penguatan Keamanan Laut	Penguatan Kapasitas Operasi Keamanan Laut	D QH	Operasi Bidang Pengawasan Sumber Daya Alam
Operasional Speed boat 16 meter (SBK)	Jumlah rata-rata hari operasi Speedboat Pengawas 16 Meter	40	Hari Operasi	782,2	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	Penguatan Keamanan Laut	Penguatan Kapasitas Operasi Keamanan Laut	D QH	Operasi Bidang Pengawasan Sumber Daya Alam
Operasional Rigid Inflatable Boat (SBK)	Jumlah rata-rata hari operasi Rigid Inflatable Boat Pengawas	40	Hari Operasi	2.445,7	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	Penguatan Keamanan Laut	Penguatan Kapasitas Operasi Keamanan Laut	D QH	Operasi Bidang Pengawasan Sumber Daya Alam
Operasional Rubber Boat (SBK)	Jumlah hari operasi Rubber Boat pengawas	40	Hari Operasi	1.212,4	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	Penguatan Keamanan Laut	Penguatan Kapasitas Operasi Keamanan Laut	D QH	Operasi Bidang Pengawasan Sumber Daya Alam
Kapal pengawas	Persentase penyelesaian pembangunan Kapal Pengawas SDKP	4	Unit	201.327,8	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	Penguatan Keamanan Laut	Penguatan Kapasitas Operasi Keamanan Laut	L RA	Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan
Prasarana Pengawasan SDKP yang dibangun	Persentase penyelesaian pembangunan prasarana pengawasan SDKP	10	Unit	15.704,5	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	Penguatan Keamanan Laut	Penguatan Kapasitas Operasi Keamanan Laut	Q RB	Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan
Sistem Pemantauan SDKP yang Operasional dan Terintegrasi	Persentase Operasional Perangkat Sistem Pemantauan SDKP yang Operasional dan Terintegrasi	1	Unit	6.409,9	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	0	0	0	G RC	OM Sarana Bidang Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup

MENJADI (USULAN PEMUTAKHIRAN RENJA 2021)

PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (RO)	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	INDIKASI PENDANAAN (RP. JUTA)	PRIORITAS NASIONAL	PROYEK PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS NASIONAL	KODE KRO	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT (KRO)
Speedboat pengawas	Persentase penyelesaian pembangunan Speedboat Pengawas SDKP	2	Unit	7.700,0	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	Penguatan Keamanan Laut	Penguatan Kapasitas Operasi Keamanan Laut	L RA	Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan
Armada Pengawasan SDKP yang dirawat	Persentase pelaksanaan perawatan armada pengawasan SDKP	122	Unit	103.669,5	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	0	0	0	G RC	OM Sarana Bidang Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup
Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang dibina dalam membantu pengawasan SDKP	Persentase POKMASWAS yang Dibina Dalam Membantu Pengawasan SDKP	1.050	Kelompok	1.900,5	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Penguatan Kelembagaan dan Penegakan Hukum di Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Penguatan Sistem Perizinan, Pengawasan, dan Pengamanan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	D QD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat
Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan				4.539,0						
Unit usaha pemanfaatan kawasan konservasi perairan nasional yang diperiksa kepatuhannya	Persentase pelaksanaan pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha pemanfaatan kawasan konservasi perairan nasional	40	Lembaga	3.500,0	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Pencegahan Kehilangan Keanekaragaman Hayati dan Kerusakan Ekosistem	QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga (Unit Usaha)
Unit Usaha Perikanan yang diawasi dari kegiatan penangkapan ikan yang merusak	Persentase pelaksanaan pemeriksaan kepatuhan unit usaha perikanan terhadap pelarangan kegiatan penangkapan ikan yang merusak	360	Lembaga	1.039,0	(Usulan PN) Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	Pencegahan Pencemaran dan Kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Pencegahan Kehilangan Keanekaragaman Hayati dan Kerusakan Ekosistem	QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga (Unit Usaha)
Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan				9.931,0						
Kapal perikanan yang diperiksa kepatuhannya	Jumlah kapal perikanan yang diperiksa kepatuhannya	20.558	Lembaga	6.131,0	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan	Peningkatan fasilitasi usaha, pembiayaan, dan akses perlindungan usaha kelautan dan	Penataan Perizinan Kelautan dan Perikanan	QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga

MENJADI (USULAN PEMUTAKHIRAN RENJA 2021)

PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (RO)	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	INDIKASI PENDANAAN (RP. JUTA)	PRIORITAS NASIONAL	PROYEK PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS NASIONAL	KODE KRO	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT (KRO)
							perikanan skala kecil serta akses terhadap pengelolaan sumber daya			
Unit usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya	Jumlah Unit usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya	665	Lembaga	3.800,0	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan	Peningkatan fasilitasi usaha, pembiayaan, dan akses perlindungan usaha kelautan dan perikanan skala kecil serta akses terhadap pengelolaan sumber daya	Penataan Perizinan Kelautan dan Perikanan	QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga
Karantina Ikan				44.137,1						
Layanan Sertifikasi karantina ekspor, impor dan domestik	Layanan Sertifikasi karantina ekspor, impor dan domestik	1	Layanan	16.416,0	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan	Peningkatan produksi, produktivitas, standarisasi mutu dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan	Karantina Ikan dan jaminan mutu	H QA	Pelayanan Publik Lainnya
Sarana pengawasan karantina	Tersedianya sarana pengawasan karantina	9	Lokasi	2.226,0	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan	Peningkatan produksi, produktivitas, standarisasi mutu dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan	Karantina Ikan dan jaminan mutu	L RA	Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan dan perikanan
Prasarana pengawasan karantina	Tersedianya prasarana pengawasan	11	Lokasi	19.481,0	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan	Peningkatan produksi, produktivitas, standarisasi mutu dan nilai tambah	Karantina Ikan dan jaminan mutu	Q RB	Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan dan perikanan

MENJADI (USULAN PEMUTAKHIRAN RENJA 2021)

PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (RO)	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	INDIKASI PENDANAAN (RP. JUTA)	PRIORITAS NASIONAL	PROYEK PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS NASIONAL	KODE KRO	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT (KRO)
							produk kelautan dan perikanan			
Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity	Unit Usaha Perikanan yang Memenuhi Standar dan Menerapkan Biosecurity	550	unit	3.716,2	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan	Peningkatan produksi, produktivitas, standarisasi mutu dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan	Karantina Ikan dan jaminan mutu	F PD	Sertifikasi Lembaga
Kasus pelanggaran perkarantinaan ikan yang di selesaikan	Kasus Pelanggaran Perkarantinaan Ikan yang Diselesaikan	80	kasus	2.297,9	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan	Peningkatan produksi, produktivitas, standarisasi mutu dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan	Karantina Ikan dan jaminan mutu	QIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk
Standardisasi Sistem dan Kepatuhan				14.968,9						
Unit kerja yang menerapkan pengendalian sistem jaminan perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan	Unit kerja yang menerapkan pengendalian sistem jaminan perkarantinaan, mutu dan keamanan hasil perikanan	85	unit kerja	500,0	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan	Peningkatan produksi, produktivitas, standarisasi mutu dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan	Karantina Ikan dan jaminan mutu	D AD	Standarisasi Lembaga
Unit kerja yang menerapkan standar sistem	Unit kerja yang menerapkan standar sistem	10	unit kerja	1.288,7	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan	Peningkatan produksi, produktivitas, standarisasi mutu dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan	Karantina Ikan dan jaminan mutu	D AD	Standarisasi Lembaga
Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen	Unit kerja yang menerapkan sistem manajemen	14	unit kerja	2.106,6	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan	Peningkatan produksi, produktivitas, standarisasi mutu dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan	Karantina Ikan dan jaminan mutu	D AD	Standarisasi Lembaga

MENJADI (USULAN PEMUTAKHIRAN RENJA 2021)

PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (RO)	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	INDIKASI PENDANAAN (RP. JUTA)	PRIORITAS NASIONAL	PROYEK PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS NASIONAL	KODE KRO	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT (KRO)
Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri				221.271,5						
Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan				152.089,5						
Pasar Ikan	Jumlah pasar ikan yang dibangun	9	Unit	22.500,0	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	Peningkatan industri pengolahan berbasis pertanian, kemaritiman, dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir	Pengembangan industri Kemaritiman	O KR	RBQ
Sentra Kuliner Ikan	Jumlah sentra kuliner ikan yang dibangun	9	Unit	22.500,0	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	Peningkatan industri pengolahan berbasis pertanian, kemaritiman, dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir	Pengembangan industri Kemaritiman	O KR	RBQ
Pasar Kuliner dan Sentra Promosi Produk Perikanan	Jumlah pasar kuliner dan sentra promosi produk perikanan yang dibangun	1	Unit	10.000,0	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	Peningkatan industri pengolahan berbasis pertanian, kemaritiman, dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir	Pengembangan industri Kemaritiman	Q RB	Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan dan Perikanan
Kajian Rencana Pembangunan Pasar Ikan Bertaraf Internasional	Jumlah kajian rencana pembangunan pasar ikan bertaraf internasional	3	Rekomendasi Kebijakan	4.800,0	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	Peningkatan industri pengolahan berbasis pertanian, kemaritiman, dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir	Pengembangan industri Kemaritiman	R PB	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan

MENJADI (USULAN PEMUTAKHIRAN RENJA 2021)

PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (RO)	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	INDIKASI PENDANAAN (RP. JUTA)	PRIORITAS NASIONAL	PROYEK PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS NASIONAL	KODE KRO	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT (KRO)
Promosi Produk Kelautan dan Perikanan Skala Internasional	Nilai potensi transaksi dari promosi skala internasional (juta USD)	5	Promosi	11.100,0	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	Peningkatan industri pengolahan berbasis pertanian, kemaritiman, dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir	Pengembangan industri Kemaritiman	H PE	Promosi
Kampanye Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (Gemarikan)	Jumlah lokasi promosi Gemarikan (lokasi)	300	Promosi	71.535,9	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat	Penurunan Stunting	H PE	Promosi
Kampanye Gemarikan yang dilaksanakan oleh daerah (Dekonsentrasi)	Jumlah kampanye Gemarikan yang dilaksanakan di daerah	34	Promosi	7.700,0	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Percepatan Perbaikan Gizi Masyarakat	Penurunan Stunting	H PE	Promosi
Perlengkapan Pedagang Ikan	Jumlah perlengkapan pedagang ikan yang diadakan	20	Unit	950,0	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	Peningkatan industri pengolahan berbasis pertanian, kemaritiman, dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir	Pengembangan industri Kemaritiman	G QE	Bantuan Peralatan/Sarana

MENJADI (USULAN PEMUTAKHIRAN RENJA 2021)

PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (RO)	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	INDIKASI PENDANAAN (RP. JUTA)	PRIORITAS NASIONAL	PROYEK PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS NASIONAL	KODE KRO	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT (KRO)
Peralatan Pemasaran	Jumlah peralatan pemasaran yang diadakan	30	Unit	1.003,6	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	Peningkatan industri pengolahan berbasis pertanian, kemaritiman, dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir	Pengembangan industri Kemaritiman	G QE	Bantuan Peralatan/Sarana
Pengolahan dan Bina Mutu Produk Kelautan dan Perikanan				22.973,0						
Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang diterbitkan bagi Unit Pengolahan Ikan	Jumlah sertifikat kelayakan pengolahan yang diterbitkan bagi unit pengolahan ikan (sertifikat)	2.650	Produk	1.500,0	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	Peningkatan industri pengolahan berbasis pertanian, kemaritiman, dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir	Pengembangan industri Kemaritiman	C PD	#REF!
Rekomendasi Penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) oleh daerah (Dekonsentrasi)	Jumlah rekomendasi penerbitan Sertifikat Kelayakan Pengolahan dari daerah	530	Rekomendasi Kebijakan	1.958,0	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	Peningkatan industri pengolahan berbasis pertanian, kemaritiman, dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir	Pengembangan industri Kemaritiman	R PB	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan

MENJADI (USULAN PEMUTAKHIRAN RENJA 2021)

PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (RO)	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	INDIKASI PENDANAAN (RP. JUTA)	PRIORITAS NASIONAL	PROYEK PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS NASIONAL	KODE KRO	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT (KRO)
Chest freezer penyimpanan ikan	Jumlah chest freezer penyimpanan ikan yang disediakan	300	Unit	2.500,0	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	Peningkatan industri pengolahan berbasis pertanian, kemaritiman, dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir	Pengembangan industri Kemaritiman	G QE	Bantuan Peralatan/Sarana

MENJADI (USULAN PEMUTAKHIRAN RENJA 2021)

PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (RO)	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	INDIKASI PENDANAAN (RP. JUTA)	PRIORITAS NASIONAL	PROYEK PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS NASIONAL	KODE KRO	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT (KRO)
Peralatan pengolahan ikan	Jumlah peralatan pengolahan yang disediakan	228	Unit	5.415,0	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	Peningkatan industri pengolahan berbasis pertanian, kemaritiman, dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir	Pengembangan industri Kemaritiman	G QE	Bantuan Peralatan/Sarana
Sarana Pasca Panen	Jumlah sarana pasca panen yang disediakan	5	Unit	5.000,0	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	Peningkatan industri pengolahan berbasis pertanian, kemaritiman, dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir	Pengembangan industri Kemaritiman	G QE	Bantuan Peralatan/Sarana
Unit Pengolahan Ikan (UPI) bernilai tambah yang dibangun menuju Zero Waste	Jumlah UPI bernilai tambah yang dibangun menuju Zero Waste (lokasi)	2	Unit	6.600,0	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	Peningkatan industri pengolahan berbasis pertanian, kemaritiman, dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir	Pengembangan industri Kemaritiman	Q RB	Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan dan Perikanan
Pengendalian Mutu				46.209,0						

MENJADI (USULAN PEMUTAKHIRAN RENJA 2021)

PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (RO)	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	INDIKASI PENDANAAN (RP. JUTA)	PRIORITAS NASIONAL	PROYEK PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS NASIONAL	KODE KRO	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT (KRO)
Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability	Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan yang menerapkan sistem traceability	200	UPI	1.268,7	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	Peningkatan industri pengolahan berbasis pertanian, kemaritiman, dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir	Pengembangan industri Kemaritiman	QIC	Pengawasan dan Pengendalian Lembaga
Hasil Perikanan di wilayah RI yang diawasi mutunya	Penjaminan mutu hasil perikanan di Wilayah RI	40	Lokasi	2.732,5	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor riil, dan industrialisasi	Peningkatan industri pengolahan berbasis pertanian, kemaritiman, dan non agro yang terintegrasi hulu-hilir	Pengembangan industri Kemaritiman	QIA	Pengawasan dan Pengendalian Produk
Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi				62.475,5						
Riset Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan				2.300,0						
Teknologi Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan	Jumlah Teknologi Pengolahan Produk dan Bioteknologi Kelautan dan Perikanan	6	Produk	2.300,0	PN 01 : Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP 04 : Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan	KP 02 :Peningkatan ekosistem kelautan dan pemanfaatan jasa kelautan	PRO-P 02 : Pengembangan marine bioproduct dan bioteknologi	A SD	Penelitian dan Pengembangan Produk
Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan				3.000,0						
Model Sosial Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan	Jumlah Model Sosial Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan	6	Model	3.000,0	PN 01 : Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP 04 : Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan	KP 05 : Peningkatan SDM dan riset kemaritiman dan kelautan serta database kelautan dan perikanan	PRO-P 02 :Penguatan Inovasi Teknologi dan Riset Kelautan dan Perikanan	C SD	Penelitian dan Pengembangan Modeling
Riset Perikanan				33.894,8						
Data dan/atau Informasi Stok Sumber Daya Perikanan pada Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Negara Republik Indonesia (NRI)	Jumlah Data dan/atau Informasi Stok Sumber Daya Perikanan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) NRI	11	Rekomendasi Kebijakan	12.176,4	PN 01 : Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP 04 : Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan	KP 01 : Peningkatan pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir serta	PRO-P 01 : Pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP)	R PB	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan

MENJADI (USULAN PEMUTAKHIRAN RENJA 2021)

PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (RO)	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	INDIKASI PENDANAAN (RP. JUTA)	PRIORITAS NASIONAL	PROYEK PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS NASIONAL	KODE KRO	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT (KRO)
							pengelolaan ruang laut			
Teknologi Hasil Riset Perikanan	Jumlah Teknologi Hasil Riset Perikanan	19	Produk	8.148,1	PN 01 : Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP 04 : Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan	KP 05 : Peningkatan SDM dan riset kemaritiman dan kelautan serta database kelautan dan perikanan	PRO-P 02 :Penguatan Inovasi Teknologi dan Riset Kelautan dan Perikanan	A SD	Penelitian dan Pengembangan Produk
Sarana Riset Perikanan	Jumlah Sarana Riset Perikanan	6	Unit	2.415,1	PN 01 : Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP 04 : Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan	KP 05 : Peningkatan SDM dan riset kemaritiman dan kelautan serta database kelautan dan perikanan	PRO-P 02 :Penguatan Inovasi Teknologi dan Riset Kelautan dan Perikanan	L RA	Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan
Prasarana Riset Perikanan	Jumlah prasarana Riset Perikanan	4	Unit	9.049,1	PN 01 : Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP 04 : Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan	KP 05 : Peningkatan SDM dan riset kemaritiman dan kelautan serta database kelautan dan perikanan	PRO-P 02 :Penguatan Inovasi Teknologi dan Riset Kelautan dan Perikanan	Q RB	Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan

MENJADI (USULAN PEMUTAKHIRAN RENJA 2021)

PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (RO)	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	INDIKASI PENDANAAN (RP. JUTA)	PRIORITAS NASIONAL	PROYEK PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS NASIONAL	KODE KRO	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT (KRO)
Data dan/atau Informasi Stok Sumber Daya Perikanan pada Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Negara Republik Indonesia (NRI) di Perairan Darat	Jumlah Data dan/atau Informasi Stok Sumber Daya Perikanan di Perairan Umum Daratan (PUD)	5	Rekomendasi Kebijakan	2.106,2	PN 01 : Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP 04 : Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan	KP 01 : Peningkatan pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) dan penataan ruang laut dan rencana zonasi pesisir serta pengelolaan ruang laut	PRO-P 01 : Pengelolaan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP)	R PB	Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan
Riset Kelautan				23.280,6						
Data dan/atau Informasi Pemetaan Sumberdaya Kawasan Pesisir	Tersedianya data dan/atau Informasi Pemetaan Sumberdaya Kawasan Pesisir	10	Rekomendasi Kebijakan	3.000,0	PN 06 : Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	KP 02 : Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim	KP 02 : Peningkatan Ketahanan Iklim	PRO-P 01 : Perlindungan Kerentanan Pesisir dan Sektor Kelautan	W PB	Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan
Data dan/atau Informasi Pemetaan karakteristik dan dinamika laut di WPP	Tersedianya data dan/atau Informasi Pemetaan karakteristik dan dinamika laut di WPP	2	Rekomendasi Kebijakan	2.000,0	PN 06 : Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim	KP 02 : Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim	KP 02 : Peningkatan Ketahanan Iklim	PRO-P 01 : Perlindungan Kerentanan Pesisir dan Sektor Kelautan	W PB	Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan
Sarana Riset Kelautan	Tersedianya Sarana Riset Kelautan	4	Unit	4.556,3	PN 01 : Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP 04 : Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan	KP 05 : Peningkatan SDM dan riset kemaritiman dan kelautan serta database kelautan dan perikanan	PRO-P 02 :Penguatan Inovasi Teknologi dan Riset Kelautan dan Perikanan	L RA	Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan

MENJADI (USULAN PEMUTAKHIRAN RENJA 2021)

PROGRAM/KEGIATAN/RINCIAN OUTPUT (RO)	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	INDIKASI PENDANAAN (RP. JUTA)	PRIORITAS NASIONAL	PROYEK PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS NASIONAL	KODE KRO	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT (KRO)
Prasarana Riset Kelautan	Tersedianya Prasarana Riset Kelautan	1	Unit	536,9	PN 01 : Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP 04 : Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan	KP 05 : Peningkatan SDM dan riset kemaritiman dan kelautan serta database kelautan dan perikanan	PRO-P 02 :Penguatan Inovasi Teknologi dan Riset Kelautan dan Perikanan	Q RB	Prasarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan
Sarana Riset Data Citra Satelit Radar	Tersedianya Sarana Riset Data Citra Satelit Radar	350	Unit	9.187,5	PN 01 : Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP 04 : Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan	KP 05 : Peningkatan SDM dan riset kemaritiman dan kelautan serta database kelautan dan perikanan	PRO-P 02 :Penguatan Inovasi Teknologi dan Riset Kelautan dan Perikanan	L RA	Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan
Sarana Riset Pemodelan Laut	Tersedianya Sarana Riset Pemodelan Laut	1	Unit	4.000,0	PN 01 : Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	PP 04 : Peningkatan pengelolaan kemaritiman, perikanan dan kelautan	KP 05 : Peningkatan SDM dan riset kemaritiman dan kelautan serta database kelautan dan perikanan	PRO-P 02 :Penguatan Inovasi Teknologi dan Riset Kelautan dan Perikanan	L RA	Sarana Bidang Kemaritiman, Kelautan, dan Perikanan
JUMLAH				2.866.326,6						

LAMPIRAN III

KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR .../KEPMEN-KP/2020

RENCANA KERJA KEMENTERIAN KELAUTAN DAN
PERIKANAN TAHUN 2021

RINCIAN KOMPONEN KEGIATAN UTAMA TAHUN 2021

NO	KEGIATAN PRIORITAS	VOLUME	
I.	DITJEN PERIKANAN TANGKAP (PN)		
1	Kapal Perikanan Ukuran 5 GT	85	unit
2	Kapal Perikanan Ukuran 10 GT	10	unit
3	Uji Coba Kapal Plat Datar	1	unit
4	Alat Penangkapan Ikan/Alat Bantu Penangkapan Ikan (termasuk rumpon 100 unit)	750	paket
5	Premi Asuransi Nelayan	120.000	orang
6	Kampung Nelayan Maju	40	lokasi
7	Pembangunan/Rehabilitasi Pelabuhan Perikanan	28	lokasi
8	Alat pengeruk lumpur/sedimen	1	unit
9	Operasional Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Saumlaki, Merauke, Natuna, dan Sebatik)	4	lokasi
10	Peningkatan Operasional Pelabuhan Perikanan	34	Provinsi
11	FS dan DED <i>Eco Fishing Port</i> (PPS Belawan PPS Kendari PPN Sungai Liat dan PPS Bitung) (Pinjaman/Loan AFD)	4	lokasi
12	Feasibility Study Major Project Pelabuhan Perikanan Terintegrasi dan Bertaraf Internasional (termasuk Maluku)	6	lokasi
13	Fasilitasi Sertifikat Hak Atas Tanah (SeHAT) Nelayan	7.500	bidang
14	Percepatan Perizinan Usaha melalui SILAT dan SIMKADA (termasuk penerbitan perizinan)	34	Provinsi
15	Fasilitasi Kredit Perikanan Tangkap	1.500	nelayan
16	Peningkatan Kapasitas Kelompok Usaha Bersama Nelayan	2.400	kelompok
17	Diversifikasi Usaha Keluarga Nelayan	2.000	RTP
18	Fasilitasi Penataan Sentra/Kampung Nelayan Melalui CSR	40	lokasi
19	Pengelolaan Perikanan Berbasis WPPNRI	11	WPP
20	Penerapan e-logbook penangkapan ikan	15.000	unit
21	Pembangunan/rehabilitasi TPI Perairan Darat	3	lokasi
22	Bakti Nelayan	40	lokasi
23	Program SKPT:		
	a. SKPT Saumlaki	1	Lokasi
	b. SKPT Merauke	1	Lokasi
	c. SKPT Natuna	1	Lokasi
	d. SKPT Sebatik	1	Lokasi
II.	DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA (PN)		
1	Bantuan benih dan calon induk untuk masyarakat		
	- Bantuan benih tawar, payau dan laut	215.758.000	ekor
	- Produksi dan Bantuan calon induk	1.068.191	ekor
	- Bantuan bibit rumput laut	200.000	kg
2	Operasional Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Rote Ndao, Sumba Timur, Sabang dan Pendampingan JICA)	3	lokasi
3	Bantuan sarana prasarana budidaya dan percontohan budidaya		
	- Kebun Bibit Rumput Laut	100	Unit
	- Excavator	40	Unit
	- Mesin Penyedot Lumpur (dredger)	2	unit
	- Irigasi Perikanan Tambak/Kolam (PITAP)	55	Unit
	- Bioflok	304	Unit

NO	KEGIATAN PRIORITAS	VOLUME	
	- Minapadi	200	Unit
	- Percontohan Ikan Hias	150	Unit
	- Bantuan KJA Budidaya Laut	150	Unit
	- Model Usaha budidaya budidaya laut (termasuk untuk lobster)	6	Unit
	- Model Usaha budidaya patin	1	Unit
	- Model Usaha budidaya kepiting	8	Unit
	- Model Usaha budidaya Sidat	1	Unit
	- Mesin pakan dan bahan baku pakan (tenggelam dan terapung)	60	Unit
	- Percontohan Pakan Alami	20	Unit
	- Model kluster usaha magot	1	Unit
	- Modernisasi dan upgrade unit produksi pakan di UPT	10	Unit
4	Percontohan pengelolaan kluster kawasan budidaya berkelanjutan		
	- Kluster kawasan tambak Udang	24	Kluster
	- Kluster kawasan tambak Udang MSF	2	Kluster
	- Penyusunan DED dan Pendukung	5	lokasi
	- Kluster kawasan tambak Bandeng	2	Kluster
	- Sarana produksi tambak	80	Unit
5	Pendampingan PHLN ADB mendukung Major Project Revitalisasi Tambak Udang	1	paket
6	Pembangunan/rehabilitasi unit pembenihan ikan skala rakyat	20	paket
7	Monitoring sampel residu dan penyakit ikan		
	- Monitoring residu	7.840	Sampel
	- Surveillance penyakit ikan	1.500	Sampel
	- Modernisasi dan Pengadaan Peralatan Laboratorium UPT	15	Unit
8	Rehabilitasi sarana dan prasarana UPT		
	- Modernisasi dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Produksi UPT	15	Unit
	- Pembangunan Pusat Produksi Benih dan Induk	2	Unit
9	Bantuan Premi Asuransi Usaha Perikanan Budidaya	5.000	Orang
10	Pra-Sertifikasi lahan budidaya	13.000	bidang
11	Produksi Pakan Mandiri Untuk Bantuan dan Operasional Budidaya di UPT	1.200.000	kg
12	NSPK Perikanan Budidaya	39	NSPK
13	Data dan Informasi Perikanan Budidaya	20	Rekomendasi Kebijakan
III.	DITJEN PENGUATAN DAYA SAING PRODUK KP (PN)		
1	Portable Cold Storage (dengan Air Blast Freezer)	15	Unit
2	Cold Storage (200-300 Ton)	1	Unit
3	Ice Flake Machine	5	Unit
4	Pabrik es balok (20 ton)	4	unit
5	Mobil refrigerasi (berpendingin)	9	Unit
6	Mobil non-refrigerasi (tidak berpendingin)	3	Unit
7	Operasional Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (Kab. Biak Numfor, dan Mimika)	2	Lokasi
8	Pasar Ikan	8	Unit
9	Feasibility study rencana pembangunan Pasar Ikan Bertaraf Internasional (major project)	3	lokasi
10	Sentra Kuliner	9	Unit
11	Pasar Ikan Kuliner dan Diorama Promosi Produk Perikanan	1	Unit
12	Chest freezer	300	Unit
13	Peralatan pengolahan	220	Unit
14	Sentra Pengolahan Hasil KP yang menerapkan konsep Zero Waste	2	Paket
15	Fasilitasi sarana penanganan pasca panen hasil kelautan dan perikanan	5	unit
16	Perlengkapan pedagang ikan	20	Paket
17	Sarana Pemasaran	30	unit

NO	KEGIATAN PRIORITAS	VOLUME	
18	Gemarikan		
	a. Safari kampanye Gemarikan	224	lokasi
	b. Dukungan Gemarikan	34	provinsi
19	Promosi Skala Internasional	5	Promosi
20	Peningkatan Kapasitas Lembaga usaha KP	35	Lembaga
21	Pelaku usaha yang difasilitasi kemudahan berusaha dan berinvestasinya	3.520	Pelaku Usaha
22	Penumbuhan wirausaha KP	200	Wirausaha
23	Sertifikat Kelayakan Pengolahan (SKP) yang diterbitkan bagi Unit Pengolahan Ikan	2.650	Sertifikat
24	Implementasi Sistem Telusur dan Logistik Ikan Nasional (STELINA)	3	Lokasi
25	Pengembangan klaster daya saing kelautan dan perikanan	3	Rekomendasi
IV.	DITJEN PENGELOLAAN RUANG LAUT (PN)		
1.	Pengelolaan Kawasan Konservasi	12,5	juta ha
2.	Penambahan luas kawasan konservasi	800	ribu ha
3.	Operasional Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (Mentawai, Morotai, Talaud, Moa)	4	lokasi
4.	Kerjasama/Jejaring konservasi keanekaragaman hayati laut dan bantuan kelompok penggerak konservasi (KOMPAK)	35	kerjasama/ kelompok
5.	Konservasi Jenis Ikan (penanganan mamalia terdampar, pelayanan Pemanfaatan jenis ikan dilindungi/ dan atau Appendiks CITES)	17	jenis
6.	Sarana prasarana pesisir dan pulau-pulau kecil (dermaga apung)	5	lokasi
7.	Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim (penanaman vegetasi pantai)	8	lokasi
8.	Pembangunan Pusat Restorasi dan Pengembangan Ekosistem Pesisir/PRPEP)	2	lokasi
9.	Rehabilitasi kawasan mangrove	400	ha
10.	Pengakuan dan penguatan kelembagaan Masyarakat hukum adat, tradisional dan lokal	5	komunitas
11.	Gerakan Cinta Laut (Gita Laut), Penanganan Sampah di Pesisir dan PPK	6	lokasi
12.	Pengembangan Usaha Garam Rakyat (PUGAR)	400	ha
13.	Pembangunan Sarana & Prasarana Niaga Garam Rakyat		
	- Revitalisasi Gudang Garam Rakyat (perbaikan menjadi Gudang garam SNI Type C)	50	unit
	- Pembangunan washing plant garam	1	lokasi
	- Sentra Ekonomi Garam Rakyat (Gudang Garam Nasional 10.000 ton, Learning Business Center/LBC, Mini Washing Plant)	2	lokasi
14.	Fasilitasi pengelolaan Reklamasi	5	lokasi
15.	Gerai biofarmaka laut	2	unit
16.	Sarpras Wisata Bahari (Dewi Bahari) dan pengelolaan BMKT	17	kawasan
17.	Perizinan lokasi di perairan (Implementasi OSS) dan pengendalian pemanf ruang laut	8	lokasi
18.	Rencana Zonasi di KSN/KSNT, perairan laut antar wilayah, dan provinsi	30	RZ
19.	Program SKPT:		
	a. SKPT Mentawai	1	Lokasi
	a. SKPT Talaud	1	Lokasi
	b. SKPT Morotai	1	Lokasi
	c. SKPT Moa	1	Lokasi
V.	DITJEN PENGAWASAN SUMBER DAYA KP (PN)		
1	Operasional kapal pengawas	122	hari
2	Operasional pesawat patroli	122	hari
3	Operasional speedboat/RIB/Rubber boat	40	hari
4	Operasional sistem pemantauan SDKP [Pusdal]	1	sistem

NO	KEGIATAN PRIORITAS	VOLUME	
5	Kapal Pengawas (2 unit Type C lanjutan tahun 2020 dan 1 unit Type A multiyears)	3	unit
6	Kapal Pengawas Type B (multiyears)	1	unit
7	Bangunan/Pos Pengawas	8	unit
8	Perawatan armada pengawasan (kapal dan speed boat)	120	unit
9	Operasional dan pembinaan POKMASWAS	1.050	kelompok
10	Operasional pengawasan kawasan konservasi	40	pelaku usaha
11	Operasional pengawasan kepatuhan kapal perikanan	20.588	Unit
12	Operasional pengawasan destructive fishing	300	Unit
13	Unit usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya	665	Unit
14	Speedboat pengawas	2	unit
VI.	BADAN RISET dan SUMBER DAYA MANUSIA KP (PN)		
1	Pendidikan Vokasi di 9 SUPM, 10 Politeknik, 1 Akademi Komunitas (AK)	8.308	Orang
2	Penelitian dan Pengabdian Pendidikan Tinggi KP (10 Politeknik dan Rintisan AK di Poltek Bitung, 1 AK; 5 rintisan SUPM menjadi Politeknik)	17	Paket
3	Sarana Prasarana Pendidikan KP (peningkatan status SUPM menjadi Politeknik 7 unit, 1 AK dan 9 Politeknik unggulan)	17	Unit
4	Mobile simulator kapal perikanan (memenuhi IMO standar STCW, untuk BP3 Banyuwangi)	1	unit
5	Rintisan instalasi balai pelatihan perikanan di Palembang (sebagai Belida Training Center)	1	paket
6	Pelatihan Masyarakat KP, meliputi paket pelatihan, bahan praktek, uang saku dan transport peserta	29.000	orang
7	Penyuluhan Kelompok Pelaku Utama/Usaha KP	41.000	kelompok
	a. Honor Penyuluh Perikanan Bantu	2.035	Orang
	b. BOP untuk 4.594 orang Penyuluh (2.559 PNS dan 2.035 PPB)	4.594	Orang
	c. Kegiatan Penyuluhan di 9 Satmingkal per Tahun (5 BP3, 4 Balai Riset dan Penyuluhan)	9	Satmingkal
8	Sarana Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan KP (5 BP3, BDA Sukamandi, dan Rintisan Lobster Center Mandalika)	7	unit
9	Teknologi hasil riset pengolahan produk dan bioteknologi KP (BBRPPBKP Slipi), bioplastik, albumin, karagenan dll	6	paket
10	Model Sosial dan Ekonomi Pembangunan Kelautan dan Perikanan (dinamika pola pemanfaatan sumberdaya KP, sosial kelembagaan dan sistem usaha perdagangan, pemasaran produk KP)	6	Paket
11	Stock assesment untuk 11 WPP (Wilayah Pengelolaan Perikanan) (BRPL Cibinong)	11	WPP
12	Stock assesment 5 WPP PD (Perairan Daratan) (BRPPUPP Palembang)	5	WPP PD
13	Teknologi hasil riset perikanan yang diimplementasikan di masyarakat (teknologi penangkapan dan budidaya)	21	paket
14	Sarana Prasarana Riset Perikanan (BRPL Cibinong, BBRPBL Gondol, BRPBAPPP Maros, BRPPUPP Palembang dan BRBIH Depok)	5	unit
15	Data dan/atau Informasi Sumberdaya Kawasan Pesisir (mitigasi tsunami, gempa bumi dan abrasi, serta kerentanan pesisir lainnya)	10	kawasan
16	Data dan/atau Informasi karakteristik dan dinamika laut di 2 WPP terkait karakteristik oseanografi (suhu, salinitas, arus, gelombang, angin)	2	paket
17	Sarpras Riset Kelautan (untuk BROL Perancak, LRSDKP Bungus, LPTK Wakatobi dan Satker Pusat)	4	unit
18	Sarpras Riset Data Satelit Radar (BROL Perancak)	350	scene
19	Sarpras Stasiun Bumi Penerima Data Satelit Radar (BROL Perancak)	1	unit

NO	KEGIATAN PRIORITAS	VOLUME	
VII.	BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN (PN)		
1	Layanan Sertifikasi Unit usaha perikanan (standar dan biosecurity)	425	Sertifikat
2	Layanan Sertifikasi dan Pengawasan karantina ekspor, impor dan domestik	12	Bulan
3	Sarana dan prasarana pengawasan karantina	20	lokasi
4	Layanan Sertifikasi dan pengawasan mutu hasil perikanan	12	bulan
5	Pengendalian mutu di sentra produksi domestik	80	lokasi
6	Pengawasan Unit Penanganan dan/atau Pengolahan Ikan terhadap sistem traceability	200	UPI
7	Sarana dan prasarana pengujian mutu	29	lokasi
8	Pengawasan di wilayah perbatasan	41	Lokasi
9	Uji laboratorium acuan dan penguji	136	Parameter
10	Penerapan sistem manajemen mutu berstandar internasional/ISO	105	Unit Kerja
VIII.	INSPEKTORAT JENDERAL (Non PN)		
1	Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Unit Kerja Mitra Inspektorat I dan Pelaksana Pembangunan KP	1	tahun
2	Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Unit Kerja Mitra Inspektorat II dan Pelaksana Pembangunan KP	1	tahun
3	Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Unit Kerja Mitra Inspektorat III dan Pelaksana Pembangunan KP	1	tahun
4	Pengawasan Akuntabilitas Aparatur pada Unit Kerja Mitra Inspektorat IV dan Pelaksana Pembangunan KP	1	tahun
5	Pengawasan Akuntabilitas Aparatur Dengan Tujuan Tertentu pada Pelaksana Pembangunan KP dan Pengawasan pada unit kerja Mitra Inspektorat V	1	tahun
6	Dukungan Manajemen	12	bulan
IX.	SEKRETARIAT JENDERAL (PN dan Non PN)		
1	Layanan Penyiapan Produk Hukum dan Penataan Organisasi KKP	12	bulan
2	Layanan Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur	12	bulan
3	Layanan Pengelolaan Keuangan	12	bulan
4	Layanan Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran, Kinerja dan Kerja Sama Antarlembaga	12	bulan
5	Layanan Pengelolaan Administrasi dan Pengadaan Barang/Jasa	12	bulan
6	Layanan Pengelolaan Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri	12	bulan
7	Layanan Pengelolaan Data Statistik dan Informasi	12	bulan
8	Pembangunan big data KP (desain, standarisasi, dan aplikasi)	1	paket
9	Pengelolaan Modal Usaha Kelautan dan Perikanan (PNBP)	12	bulan
10	Dekonsentrasi :		
	- Pengelolaan Perencanaan, Penganggaran, dan Kinerja	34	provinsi
	- Pengelolaan Keuangan KKP	34	provinsi
	- Pengelolaan Data Statistik dan Informasi KP	34	provinsi

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIC INDONESIA,

ttd.

EDHY PRABOWO